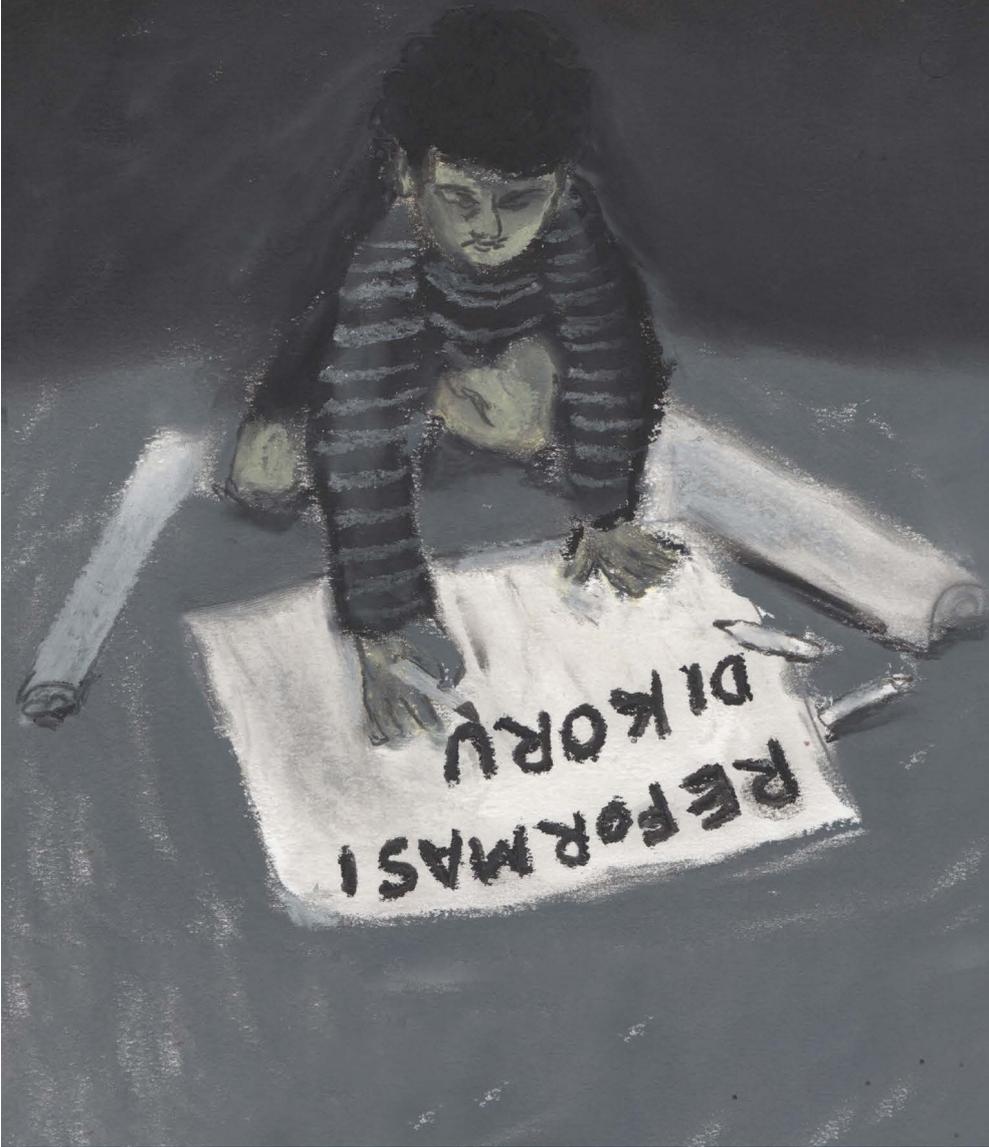


Juni 2020

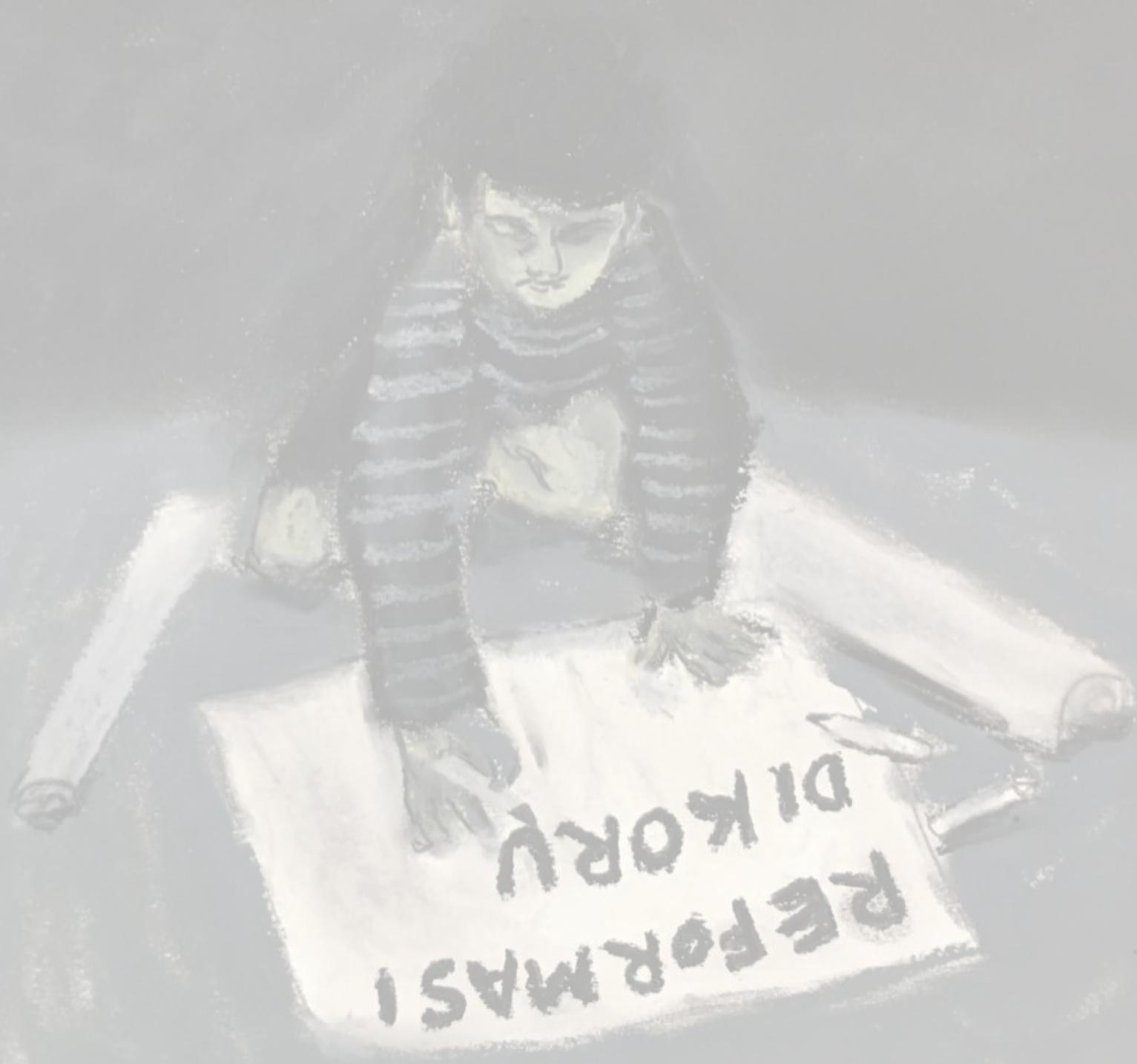


PAMFLET

CATATAN HARIAN

#REFORMASIDIKORUPSI

Ayunita Xiao Wei
Firman Maulana
Muhammad Hisbullah Amrie
Rosa Vania
Siti Rahayu



REFORMASI
DIKORU

CATATAN HARIAN

#REFORMASIDIKORUPSI

Juni 2020

Penulis:

Ayunita Xiao Wei

Firman Maulana

Muhammad Hisbullah Amrie

Rosa Vania

Siti Rahayu

Editor:

Coory Yohana

Fian Kurniawan

Rosa Vania

Penata Letak

Muhammad Rizki

Ilustrasi Sampul

Taufiqurrahman

Mengapa Kami Ingin Kalian Membaca Newsletter Ini?

Halo teman-teman! Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Tim Pamflet kabarnya baik-baik saja, tapi kerinduan kami untuk bisa bertemu secara langsung dan mendiskusikan keresahan kita bersama sudah terlalu besar untuk terus ditahan sendiri.

Di tengah masa pandemi ini, pertemuan fisik harus dibatasi demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Alhasil, perbincangan yang sering muncul tentang ide dan rencana untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita menjadi semakin jarang dan berjarak rasanya. Tapi, apa boleh buat. Kita harus mulai mencoba untuk membiasakan diri dan beradaptasi dengan keadaan yang ada. Perbincangan kita tidak boleh berhenti karena terbatas pada pertemuan fisik saja. Teknologi mampu menghubungkan kita yang saling berjauhan untuk tetap saling bertukar isi pikiran. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan ide seperti diskusi via media daring, mengikuti pelatihan atau sesi sharing, dan juga lewat tulisan seperti newsletter ini.

Sejujurnya, edisi ini seharusnya sudah dipublikasikan beberapa bulan yang lalu. Namun, karena beberapa hal yang terjadi kami baru bisa menyelesaikannya sekarang.

Tapi, keterlambatan kami ini tidak serta merta membuat tulisan-tulisan ini menjadi tidak

relevan. Kami ingin teman-teman membaca tulisan ini dengan kaca mata sebagai pengamat. Kami mengajak teman-teman untuk melihat lagi apa yang sudah terjadi di dalam rangkaian protes #ReformasiDiKorupsi kemarin. Kenapa? Dengan melihat kembali, kita bisa mengingat kembali hal-hal apa yang telah kita lakukan dan perlu untuk ditingkatkan serta apa yang masih belum kita sadari saat itu. Dalam sebuah gerakan sosial, mempelajari strategi dan repertoar sendiri adalah hal yang penting untuk bisa membawa gerakan ke arah yang lebih maju.

Selain itu, kami juga berharap kita bisa mengingat kembali tujuan awal kita memulai perlawanan dengan asumsi bahwa protes besar-besaran tahun lalu hanyalah satu babak penting dari episode panjang gerakan kita. Beberapa tuntutan yang kita teriakkan kemarin mungkin sudah tidak mungkin terpenuhi lagi. Beberapa rancangan undang-undang yang kita tolak sudah atau akan disahkan sebentar lagi. Bukan hanya itu, ruang demokrasi kita juga semakin digerus bahkan di masa pandemi ini. Negara dengan aktif berusaha membungkam teman-teman kita yang menyuarakan penolakan terhadap tindak kekerasan dan korupsi yang dilakukan oleh aparat dan para pejabat. Berbagai aksi teror terus ditujukan kepada warga sipil, bahkan hingga ancaman penjara. Hal ini semakin terlihat jelas saat kita mulai membicarakan isu Papua.

Melihat semua masalah saat ini, kita perlu memikirkan lagi langkah apa yang harus kita ambil. Bukan hanya satu, tapi dua atau tiga langkah ke depan. Kita perlu melihat pola reaksi negara saat kita mulai bergerak. Salah satu cara untuk memikirkan strategi ini adalah dengan mempelajari kembali gerakan yang telah kita bangun.

Kami sadar, bahwa tulisan ini mungkin tidak memberikan solusi apapun kepada teman-teman. Namun, sebagai pengamat, kami menerima segala bentuk masukan dan ide yang mungkin mau kalian bagikan.

Salam,

Tim Pamflet

Semua Tentang Partisipasi Politik Anak Muda

Yang dikira kaum pembangkang tak tahu aturan.

Yang dipandang sebelah mata dan perlu tuntunan.

Yang dihakimi kurang pengalaman dan kurang pengetahuan.

Yang selalu dijadikan objek atas nama nasionalisme dan pemberdayaan.

Yang akhirnya muak dengan semua tetek bengek itu.

Lagi-lagi, memang harus terus memberitahu orang lain bahwa partisipasi politik bukan hanya memilih di pemilu semata.

Bahkan, orang masih pula menganggap bahwa tidak memilih adalah tindakan apolitis dan abai terhadap 'nasib negara'. "Ngapain sih demo, salah sendiri kemaren golput", begitu katanya. Atau, "Kan golput kemaren, gak berhak dong mengkritik". Layaknya orang yang tidak memahami bahwa ada undang-undang kita yang dengan jelas melindungi kebebasan berpendapat.

Lantas apa yang mereka harapkan? Memilih dan langsung mempercayakan segalanya pada yang sudah dipilih? Tidak pernah ada penelitian di dunia ini yang menyatakan bahwa memilih salah satu pihak dalam pemilu berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inti partisipasi politik, setidaknya salah satunya, adalah menuntut, atau setidaknya mengingatkan, pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya menjamin kesejahteraan masyarakat. Bukan partisipasi politik namanya jika seorang anti golput dengan bangga memamerkan kelingking ungunya dan setelah itu menerima saja segala konsekuensi.

Seorang partisipan politik yang baik, meski terdengar semacam 'sekadar mengingatkan', adalah mereka yang tidak malu mengkritik pemerintah meski yang dikritik adalah yang ia pilih dalam pemilu. Seorang Jokower yang akan terus membela Jokowi tanpa pandang konsekuensi adalah seorang fan, bukan partisipan politik yang sehat. Toh, mengidolakan seseorang atas nama ketokohan sudah terbukti bukan jalan yang bijak. Hal ini justru membuat daya kritis kita tumpul dan cenderung menyetujui saja apa yang disampaikan oleh tokoh idolanya. Layaknya pendukung Donald Trump yang terus mendukung apapun keputusan Trump meski hal tersebut melawan kemanusiaan, dan menganggap semua kritik pada Trump adalah hoax. Percayalah, tidak ada bedanya, Bung.

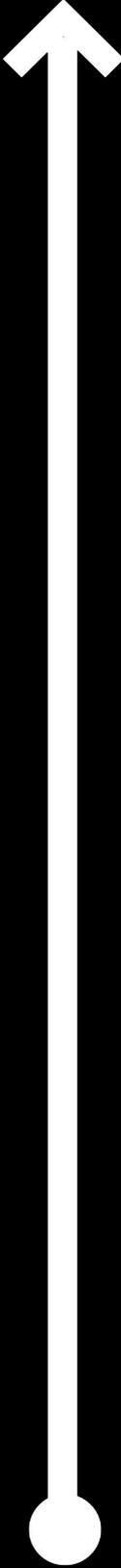
Aktivisme anak muda yang terjadi sepanjang tahun 2019, yang tidak hanya terjadi di negara kita, adalah tanda bahwa kelompok pembangkang ini masih mau terus memperjuangkan keadilan. Mengkritik pemerintahan yang korup. Menuntut penyelesaian kemiskinan yang terjadi di negaranya. Membangkang demi perbaikan taraf hidup orang banyak, bukan segelintir pengusaha. Kelompok pembangkang ini adalah mereka yang selalu terpinggirkan dan selalu disisihkan dalam pengambilan keputusan, sama seperti di negara kita. Negara yang memiliki undang-undang kepemudaan, yang dibuat oleh orang yang ketua-tuaan. Kelompok pembangkang ini rela turun ke jalan diserbu gas air mata, terancam ditangkap polisi, terancam dikeluarkan dari sekolah dan kampus, terancam dipecat, dan terancam jadi bulan-bulanan anggota keluarganya, atau bahkan bulan-bulanan teman sepermainannya.

Biarin aja. Biarkan diri kita muak dengan segala hal itu. Tempat kita bukan di dalam auditorium bersama ribuan orang lainnya mendengarkan ceramah 'dari yang tua untuk yang muda' namun dibungkus dengan slogan 'anak muda juga bisa'. Tenaga kita bisa digunakan untuk hal yang lebih penting, bukan hanya untuk sekedar tujuan keuntungan atau ketenaran. Semoga cerita kaum pembangkang dalam newsletter ini menggugah kamu untuk terus membangkang demi kepentingan kelompok marginal yang terus dirugikan. Mereka, kaum pembangkang, akan membuka mata kita bahwa partisipasi politik bukan cuma sekedar teriak, "Jangan golput ya!"

Selamat membaca.

Muhamad Hisbullah Amrie
Koordinator Umum Perkumpulan Pamflet Generasi

2019: Tahun Aksi, Semangatnya Masih Sampai Tahun Ini



Oleh: Muhammad Hisbullah Amrie

Venezuela (Januari 2019)

Setelah Nicolas Maduro ditetapkan sebagai Presiden Venezuela untuk kedua kalinya dan dilantik pada tanggal 10 Januari 2019, aksi protes menolak keputusan tersebut berlangsung sejak 11 Januari hingga bulan terakhir di tahun yang sama. Maduro dinilai telah gagal menyelamatkan ekonomi Venezuela setelah menjabat sejak 2013. Lebih dari seratus orang terbunuh dalam rangkaian aksi di tahun 2019 dan setengahnya terjadi di dua bulan pertama, kebanyakan terbunuh karena tertembak senjata dari pasukan militer di bawah administrasi Nicolas Maduro. Lima puluh negara di dunia, termasuk Amerika Serikat akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Nicolas Maduro dan mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela.

Haiti (Februari 2019)

Bermula dari berhentinya pasokan minyak dari Venezuela pada bulan Maret 2018, harga kerosin di Haiti melonjak lebih dari lima puluh persen, begitu juga pajak yang melambung di berbagai jenis bahan bakar lainnya. Demonstrasi pertama dilakukan pada bulan Juli 2018 dan berlanjut hingga November 2018. Namun, permasalahan ekonomi yang berlarut dan naiknya biaya hidup memicu protes signifikan pada Februari 2019 yang menyebabkan kerusakan banyak fasilitas umum dan penjarahan pasar. Korban jiwa berjatuhan karena tembakan senjata di setiap aksi yang dilakukan sepanjang 2019 dan setidaknya tiga jurnalis terbunuh. Jovenel Moise diminta mundur atas perintah melakukan kekerasan dan korupsi yang dilakukannya.

Algeria (Februari 2019)

Abdelaziz Bouteflika mengumumkan dirinya akan maju dalam pemilihan presiden untuk kelima kalinya pada 10 Februari 2019. Enam hari kemudian, protes berlangsung untuk menolak pencalonan kembali Abdelaziz karena korupsi masif yang dilakukan dalam periode administrasinya. Demonstrasi besar terus berlangsung hingga diperkirakan tiga juta orang turun ke jalan pada 1 Maret 2019. Aksi berantai menuntut penyelenggara pemilu untuk mengundur jadwal pemilu hingga akhirnya pemilu diadakan pada 12 Desember 2019 meski pengajuan kandidat sudah dilakukan pada bulan Maret. Ratusan demonstran ditahan selama periode aksi di tahun 2019 dan aksi terus berlangsung menuntut persidangan yang adil hingga Januari 2020 meski presiden baru sudah terpilih.

Sudan (April 2019)

Setelah berkuasa selama tiga puluh tahun, Omar al-Bashir dituntut mundur dari jabatannya sebagai kepala negara. Demonstrasi besar mencapai puncak pada tanggal 6 April 2019, yaitu saat rakyat sipil berkumpul di depan markas militer dan meminta mereka menarik Omar al-Bashir keluar. Lima hari kemudian, tentara mengumumkan bahwa Presiden sudah turun tahta. Protes sebenarnya dimulai sejak Desember 2018 yang menyebabkan tujuh demonstran meninggal dan 180 orang luka-luka. Setelah Presiden turun tahta, demonstrasi terus berlanjut menuntut pemilihan yang jujur dan berdasarkan keinginan masyarakat.

Hong Kong (April 2019)

Demonstrasi besar di Hong Kong yang menarik perhatian dunia di tahun 2000-an adalah Revolusi Payung yang diinisiasi oleh sekelompok pelajar di tahun 2014. Tuntutannya adalah pemilihan terbuka tanpa campur tangan Pemerintah Cina. Pada tahun 2019, demonstrasi besar kembali muncul setelah peraturan ekstradisi diperkenalkan, yang dapat menempatkan warga Hong Kong diadili dan diekstradisi ke dataran Cina. Okupasi kampus dilakukan mahasiswa untuk menghalau polisi masuk ke kampus dan menahan para demonstran. Setelah demonstrasi besar pada 28 April 2019, warga Hong Kong berdemonstrasi secara rutin pada jam makan siang dan jam pulang kerja meski bentrok terus terjadi di antara waktu tersebut antara polisi dengan kelompok demonstran militan yang tak segan melemparkan bom molotov.

Indonesia (September 2019)

Setelah DPR mengesahkan RUU KPK pada 17 September 2019, kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa memandang bahwa RUU ini dapat melemahkan independensi KPK dan melemahkan proses penyelidikan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Setidaknya ada 26 poin yang bermasalah dalam RUU ini. Di akhir masa jabatannya pun, DPR memperkenalkan Rancangan KUHP baru yang memuat peraturan kriminalisasi kelompok marjinal dan pembungkaman ekspresi politik warga negara, mulai dari larangan mengkritik pemerintah, pembatasan akses kontrasepsi, pemenjaraan gelandangan, hingga larangan berzina. Demonstrasi besar terjadi pada 24 September 2019 setelah sehari sebelumnya rangkaian demonstrasi dilakukan di beberapa kota lain di Indonesia. Ribuan mahasiswa berkumpul di depan Gedung DPR untuk menuntut pembatalan setidaknya dua rancangan UU, yaitu RUU KPK dan RKUHP.

Chile (Oktober 2019)

Naiknya harga tiket kereta bawah tanah Santiago Metro yang berhubungan juga dengan biaya hidup yang meningkat, privatisasi sarana publik, serta tingginya ketimpangan di negara menyebabkan protes besar yang terjadi di Chile. Awal mula aksi protes adalah okupasi stasiun metro oleh pelajar sebagai bentuk kekecewaan mereka terkait kenaikan harga tiket. Sejak saat itu, aksi demonstrasi berkembang dan terus berlangsung hingga akhir tahun 2019. Kekerasan aparat keamanan terhadap para demonstran menyebabkan setidaknya 31 orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terluka. Semua ini disangkal oleh aparat keamanan. Pada peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kolektif perempuan juga menggelar aksi besar dengan menyanyikan serta menarikan lagu *Un Violador En Tu Camino (A Rapist in Your Way)*, menceritakan bahwa negara, polisi, dan pejabat lainnya adalah pihak yang melakukan dan melanggengkan kekerasan melalui sistem.

Lebanon (Oktober 2019)

Rencana pemerintah untuk memberlakukan pajak pada bahan bakar, tembakau, dan komunikasi (salah satunya pemberlakuan pajak pada penggunaan WhatsApp) memicu aksi besar yang dimulai pada 17 Oktober 2019. Banyaknya kasus korupsi dan tingginya angka pengangguran menjadi permasalahan utama yang dituntut oleh demonstran untuk segera diselesaikan, pilihan lain adalah turun tahtanya pemerintahan saat itu. Sejak dimulainya aksi pertama hingga akhir tahun, demonstrasi telah berlangsung selama sebelas minggu.

Iran (November 2019)

Kenaikan harga bahan bakar memicu demonstrasi besar pada 15 November 2019 malam hari di 21 kota. Protes yang dihadiri ratusan hingga ribuan orang secara damai kemudian dibubarkan secara paksa dan dengan kekerasan oleh satuan pengamanan pemerintah. Amnesty International melaporkan bahwa setidaknya 143 demonstran meninggal setelah aksi tersebut

Kolombia (November 2019)

Dimulai pada 21 November 2019, ratusan ribu warga Kolombia yang terdiri dari pensiunan, pelajar, guru, dan serikat buruh berdemonstrasi dan menandakan demonstrasi terbesar sepanjang tahun. Rencana pemotongan dana pensiun, sistem kesehatan yang buruk, banyaknya korupsi yang dilakukan pejabat negara, hingga banyaknya kasus kekerasan yang tidak ditangani oleh negara menjadi alasan demonstrasi besar terjadi. Tuntutan demonstran untuk kenaikan dana pensiun, perbaikan sarana kesehatan, perbaikan sistem pendidikan, peningkatan gaji dan penyediaan lapangan kerja terus disuarakan demonstran.

India (Desember 2019)

Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan di penghujung tahun 2019 yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi menuai aksi protes besar-besaran, khususnya dari kelompok mahasiswa. Amandemen ini memuat pasal kemudahan bagi pengungsi dari negara tetangga yang beragama Hindu, Kristen, Parsi, Jain, atau Buddha yang sering mengalami persekusi. Namun peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Amandemen ini dinilai rasis dan memicu kemarahan mahasiswa, khususnya mereka yang bersekolah di Jamia Millia Islamia dan Aligarh Muslim University pada 15 Desember 2019. Polisi merangsek masuk universitas, yang menyebabkan lebih dari 100 mahasiswa terluka dan puluhan mahasiswa ditahan. Mahkamah Agung India menolak amandemen ini pada 18 Desember 2019.

Referensi:

Aljazeera. (2019). Aljazeera: India Citizenship Law Protests: All the Latest Updates. Diakses pada 20 Februari 2020 di tautan: <https://www.aljazeera.com/news/2019/12/india-citizenship-law-protests-latest-updates-191216080909659.html>

Aljazeera. (2019). Aljazeera: Lebanon Protesters Seek to Shut Down Key State Institutions. Diakses pada 20 Februari 2020 di tautan: <https://www.aljazeera.com/news/2019/11/lebanon-protesters-seek-shut-state-institutions-191106071921890.html>

Aljazeera. (2019). Aljazeera News: Millions March: Sudanese Renew Protests to Demand Civilian Rule. Diakses pada 10 Februari 2020 di tautan: <https://www.aljazeera.com/news/2019/06/march-sudanese-renew-protests-demand-civilian-rule-190630122106508.html>

Associated Press in Jakarta. (2019). The Guardian: Indonesian Students Clash with Police in Protests Over New Law. Diakses pada 20 Februari 2020 di tautan: <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/30/indonesian-students-resume-anti-corruption-protests>

BBC. (2019). BBC News: Algeria Protest: Thousands Flood Capital to Demand 'New Revolution'. Diakses pada 10 Februari 2020 di tautan: <https://www.bbc.com/news/world-africa-50261420>

BBC. (2020). BBC News: Venezuela Crisis: How The Political Situation Escalated. Diakses pada 10 Februari 2020 di tautan: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36319877>

Brown, Hannah. (2019). Vox: Algeria's Forgotten Protesters. Diakses pada 10 Februari 2020 di tautan: <https://www.vox.com/world/2019/11/14/20961104/algeria-protests>

CCuffe, Sandra. (2019). Aljazeera: One Month On: Protests in Chile Persist Despite Gov't Concessions. Diakses pada 20 Februari 2020 di tautan: <https://www.aljazeera.com/news/2019/11/month-protests-chile-persist-gov-concessions-191118231609475.html>

Daniels, Joe Parkin. (2019). Colombia: Thousands Take to The Streets in Third National Strike in Two Weeks. Diakses pada 20 Februari 2020 di tautan: <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/04/colombia-protest-duque-bogota>

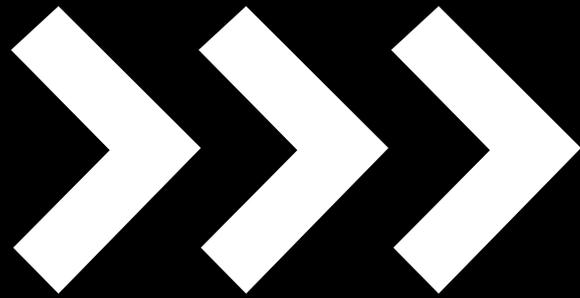
El Mundo. (2019). El Mundo: 'Un Violador En Tu Camino', El Himno Global Feminista Que Nacio en Chile. Diakses pada 20 Februari 2020 di tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=mjhGYeKHkbQ>

KPK. (2019). KPK Identifikasi 26 Poin yang Berisiko Melemahkan di RUU KPK. Diakses pada 20 Februari 2020 di tautan: <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-berisiko-melemahkan-di-ruu-kpk>

Marshall, Gary. (2019). The Guardian: Why People are Protesting in Haiti - Video Report. Diakses pada 10 Februari 2020 di tautan: <https://www.theguardian.com/world/video/2019/oct/25/why-people-are-protesting-in-haiti-video-report>

Safi, Michael. (2019). The Guardian: What are The Indian Protests About and How Significant are They? Diakses pada 20 Februari 2020 di tautan: <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/19/what-are-indian-citizenship-protests-about-and-how-significant-are-they>

The Guardian. (2019). Guardian News: Chile: Students Ambush Metro Stations in protest Over Fare Hikes. Diakses pada 20 Februari 2020 di tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=0e1qbELHIEQ>



Ada Apa Dengan Demonstrasi?

Oleh: Firman Maulana

“Demo mulu, mau jadi apa memangnya?”

Kamu pasti pernah mendengar kalimat itu, kan? Entah dari guru, orangtua, kerabat, atau teman sejoli. Beberapa orang sebenarnya bingung kenapa ada orang yang berdemo karena biasanya kegiatan ini dikaitkan dengan kerusuhan, ditunggangi atau anti pemerintah. Pertanyaan tersebut muncul karena masih banyak kesalahan berpikir yang dilakukan orang-orang saat memaknai peristiwa yang sedang terjadi. Selain kalimat di awal, ada juga kalimat lain yang bisa buat kamu bingung. Ya, kebingungan yang membuat kamu berpikir apakah kamu masih tinggal di negara yang menganut sistem demokrasi atau tidak.

1. Masih jaman demo?

Demonstrasi dinilai sudah usang karena sangat sering terjadi. Banyak orang beranggapan bahwa sekarang sudah seharusnya menggunakan daya kreatif untuk menarik perhatian pemerintah. Ditambah dengan berkembangnya teknologi, banyak yang mengatakan bahwa sebaiknya kritik pemerintah lewat karya. Masalahnya, tidak semua kebijakan atau peraturan yang dikritisi bisa dibalas dengan karya. Tujuan demonstrasi pun bukan untuk membuat sesuatu, namun lebih ke menunjukkan sikap protes atau mendukung sesuatu. Demonstrasi ada untuk menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kegelisahan yang tidak sempat dilirik oleh pemerintah.

2. Gak kasian sama polisinya?

Banyak yang menilai bahwa polisi seharusnya juga dilirik sebagai individu yang sama dengan demonstran, sehingga perlu juga diperhatikan hak-haknya saat

mengatasi kerusuhan. Iya sih, tapi kan polisi adalah alat negara yang berfungsi untuk mengayomi warga dan diberi fasilitas lengkap untuk mengamankan aksi jika berakhir ricuh. Ada gas air mata, pentungan, pelindung lengkap serta water canon yang bisa dipakai untuk memadamkan kebakaran hutan. Sedangkan warga yang berdemonstrasi?

3. Siapa suruh demo, makanya kena tangkap.

Entah apa yang merasuki orang yang mengatakan hal ini. Demonstrasi bukanlah hal yang dilarang oleh negara, malah demonstrasi adalah hal yang lumrah terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi. Kita punya Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Demonstrasi juga salah satu cara untuk mengekspresikan hak berpendapat. Jadi, warga yang melakukan demonstrasi seharusnya dilindungi dan dihargai haknya, bukan malah ditangkap dan dicap sebagai provokator.

4. Emangnya ngerti sama isi tuntutanannya?

Kalau lihat di berita ada demonstran yang bingung dan diam ketika ditanya apa isi tuntutanannya bukan berarti demonstran tersebut tidak boleh ikut aksi. Karena banyak orang yang memilih untuk turun ke jalan bukan karena paham betul isi tuntutanannya kalimat per kalimat. Pesan yang mereka pahami adalah bahwa mereka yang memiliki kuasa telah menyebabkan atau membiarkan rakyat dirugikan atau dilukai haknya. Banyak orang yang turun karena peduli terhadap mereka

yang merasa dirugikan atau merasa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah. Akhirnya mereka memilih untuk bersolidaritas dengan orang-orang yang dirugikan atau mereka yang akan atau telah terkena dampak buruk kebijakan pemerintah.

5. Ngapain sih pelajar ikut aksi, belajar aja dulu yang bener.

Aksi #ReformasiDikorupsi menjadi aksi terbesar dalam masa reformasi, bukan hanya mahasiswa dan masyarakat sipil yang ikut turun, namun pelajar STM/SMK/SMA juga turut turun ke jalan untuk bersolidaritas. Mereka sampai membuat gerakan #STMMelawan untuk menunjukkan kehadiran mereka. Walau begitu, banyak yang menyayangkan gerakan pelajar tersebut. Mereka menganggap pelajar tidak semestinya ikut turun ke jalan. Mereka seharusnya belajar di kelas saja.

Alasan lain adalah banyak yang khawatir kalau gerakan pelajar turun ke jalan ditunggangi oleh masyarakat yang berniat menggulingkan pemerintahan yang sah. Mirisnya, mereka lupa bahwa pelajar juga punya hak yang sama yaitu menyampaikan aspirasi di depan umum. Tidak ada batasan apakah ia pelajar atau mahasiswa atau buruh sekalipun. Hak untuk menyampaikan pendapat seharusnya bisa dilakukan oleh semua orang.

6. Demonya ditunggangi.

Ketika melihat demonstrasi yang begitu besar dan terjadi tidak hanya di satu daerah, maka satu hal yang paling sering dilontarkan adalah demonstrasi tersebut ditunggangi oleh partai/ormas/oposisi/Barat. Sering dengar, kan? Padahal kata “ditunggangi” ini juga patut dipertanyakan. Penguasa sering menggunakan kalimat ini untuk melindungi martabatnya sehingga masyarakat menilai bahwa mereka tidak salah. Bahwa demonstrasi hanya untuk mencapai perebutan kekuasaan. Padahal, jauh dari itu banyak aspek substantif yang sengaja dibiaskan. Akibatnya, akar permasalahan kenapa aksi muncul pun dilupakan dan demonstrasi hanya menjadi buruk di mata masyarakat.

7. Galang dana buat demo itu makar.

Masih ada orang yang bilang bahwa mengumpulkan dana untuk membantu demonstrasi adalah perbuatan makar. Padahal, demonstrasi itu bukan makar. Jadi, gak ada sangkut pautnya sama sekali. Justru penggalangan dana selain untuk menunjang kelengkapan aksi juga digunakan untuk membantu korban aksi yang terluka saat terjadi kerusuhan. Karena kerusuhan tidak hanya dimulai dari demonstran saja, tapi banyak juga polisi yang mulai memukul mundur demonstran dan melakukan aksi brutalitas dengan alasan “ada provokator.”

8. Perempuan ngapain ikut demo?

Pernah dengar teriakan “yang perempuan mundur” saat aksi? Atau tulisan anjuran bahwa lebih baik perempuan tidak ikut aksi? Ini menjadi miris, karena

seharusnya hak untuk menyampaikan pendapat dimiliki oleh semua orang, terutama perempuan. Aksi yang digambarkan begitu buas membuat masyarakat berpikir bahwa perempuan dengan stigma lemahnya tidak pantas ikut aksi. Padahal, negara seharusnya menjaga agar aksi dapat berjalan baik, bukan malah memperparah dengan kesewenang-wenangan dan menggunakan abuse of power.

9. Demo itu hanya bikin macet.

Alih-alih melihat penyebab demonstrasi yang lebih krusial, kebanyakan orang gerah karena efek saat demonstrasi sangat mengganggu lalu lintas. Mereka kesal karena sebagian jalan ditutup saat aksi berlangsung. Padahal efek kebijakan yang salah dari pemerintah lebih buruk dari macet parah yang hanya sehari saat aksi. Sedangkan efek kebijakan yang salah dari pemerintah dapat bertahan lebih dari satu dekade. Kebayangkan buruknya kayak gimana? Jalan hanya ditutup jika ada banyak massa aksi dan tempat yang strategis.

10. Jangan demo, kasian yang sedang kerja terganggu.

Turun ke jalan memiliki konsekuensi yang panjang. Salah satunya adalah banyak pekerja yang terganggu. Ya, kalimat ini diucapkan oleh salah satu artis pada Twitturnya. Walau begitu demonstrasi tidak benar-benar mengganggu semua pekerja. Apalagi biasanya waktu aksi yang biasanya baru mulai setelah jam masuk kerja. Saat aksi, hanya lalu lintas yang menjadi lebih padat biasanya. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa jalan yang tertutup. Itu pun juga kalau aksinya memiliki lebih dari seribu massa. Kalau hanya sedikit, hanya beberapa jalan saja yang ditutup.

Nah, itu kalimat-kalimat yang sering didengar. Menurut kamu, kesalahan berpikir apa yang sering kamu dengar seputar aksi?

Anak Muda dalam Pusaran Reformasi yang Dikorupsi!
Anak Muda dalam Pusaran Reformasi yang Dikorupsi!

Katanya anak muda cuma bisa rebahan sambil main sosmed. Masa sih? Aksi #ReformasiDikorupsi bakal bikin kita mikir ulang kalau anak muda tuh bisa jadi bagian pendesak perubahan di negaranya.

Tanggal 23-30 September 2019 adalah salah satu hari bersejarah bagi pergerakan anak muda Indonesia. Saat itulah mahasiswa-mahasiswi dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan dan menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan-keputusan *ngawur* pemerintah. Di tengah-tengah sentimen yang kencang akan apatisme Generasi Milenial dan Z, anak-anak muda ini justru menunjukkan kalo mereka peduli banget sama reformasi yang diam-diam dan perlahan dikorupsi.

Tidak hanya di Ibukota, anak-anak muda di berbagai kota seperti Medan, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Kendari, dan Makassar juga menggelar aksi serupa. Aksi yang disatukan dengan tagar #ReformasiDikorupsi ini punya berbagai nama, seperti Gejayan Memanggil, Malang Bergerak, Semarang Melawan. Meski terjadi di berbagai kota, tuntutanannya sama, yaitu menolak pelemahan KPK lewat revisi UU KPK, dukungan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta sama-sama resah akibat konflik agraria, kerusakan lingkungan, juga pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi di Papua.

Selama 21 tahun pasca-reformasi, mahasiswa dan pelajar masih jadi bagian penting penjaga amanat-amanat rakyat. Kalau masih ingat, ada enam tuntutan

reformasi yang termuat dalam enam amanat reformasi. Semuanya tertuang dalam Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi. Herannya, hingga era pemerintahan saat ini hampir semuanya belum dipenuhi.

Menurut survei Indo Barometer tentang pemenuhan amanat reformasi, setelah dua puluh tahun kemudian, ada lima amanat reformasi yang belum diwujudkan. Di antaranya adalah pengusutan kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan penculikan aktivis, penegakan hukum yang adil, penghapusan budaya Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN), pengurangan

#REFORMASIDIKORUPSI
#RAKYATBERGERAK
7 DESAKAN

- 1 MENOLAK RKUHP, RUU PERTAMBANGAN MINERBA, RUU PERTANAHAN, RUU PERMASYARAKATAN, RUU KETENAGAKERJAAN;
MENDESAK PEMBATALAN UU KPK DAN UU SDA;
MENDESAK DISAHKANNYA RUU PKS DAN RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA;
- 2 BATALKAN PIMPINAN KPK BERMASALAH PILIHAN DPR;
- 3 TOLAK TNI & POLRI MENEMPATI JABATAN SIPIL;
- 4 STOP MILITERISME DI PAPUA DAN DAERAH LAIN,
BEBASKAN TAHANAN POLITIK PAPUA SEGERA!
- 5 HENTIKAN KRIMINALISASI AKTIVIS;
- 6 HENTIKAN PEMBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN & SUMATERA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI, DAN PIDANAKAN KORPORASI PEMBAKAR HUTAN, SERTA CABUT IZINNYA;
- 7 TUNTASKAN PELANGGARAN HAM DAN ADILI PENJAHAT HAM; TERMASUK YANG DUDUK DI LINGKARAN KEKUASAAN;
PULIHKAN HAK-HAK KORBAN SEGERA!

.....



kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu, serta pengusutan tuntas kasus kerusuhan Mei 1998.

“Banyak banget cita-cita reformasi yang terhambat perwujudannya karena nggak pernah secara serius dijalanin,” kata Nisrina Nadhifah, aktivis muda yang gemar ngomongin hak asasi manusia. Selama beberapa bulan terakhir menjelang September 2019 lalu, ia menilai ada banyak kekacauan yang terjadi di Indonesia yang akhirnya diformulasikan dalam tujuh desakan #ReformasiDikorupsi.

Tujuh Desakan

Gerakan massa di akhir September 2019 ini tidak serta-merta turun dari langit. Konsolidasi masyarakat sipil sebenarnya sudah terbentuk sejak revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ketahuan bakal membatasi ruang gerak demokrasi. Pasal-pasal yang bikin resah misalnya, gelandangan dan pengemis bisa didenda. Belum lagi, pemilik unggas yang peliharaannya masuk ke pekarangan rumah orang lain dan merusak tanaman juga bisa kena denda. Keduanya adalah segelintir pasal bermasalah yang ada di RKUHP yang ditolak oleh koalisi masyarakat sipil dengan kampanye #SemuaBisaKena. Nah, yang juga bikin khawatir sebetulnya ada banyak, diantaranya pembatasan hak kesehatan reproduksi, ancaman terhadap kebebasan individu, serta penurunan masa hukuman kasus korupsi.

Menjelang transisi politik, tepatnya pada 24 September 2019, RKUHP dijadwalkan disahkan. Dalam waktu singkat, ada beberapa RUU bermasalah yang direncanakan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang hampir reses itu. Antara lain RUU KPK, RUU Sumber Daya Air (SDA), RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB), RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, ada lebih banyak masalah di Indonesia yang belum diselesaikan pemerintah. Contohnya, tahanan politik di Papua yang berjuang agar hak-hak masyarakat Papua dipenuhi pemerintah, kerusakan lingkungan dan kebakaran, konflik agraria di berbagai titik tidak dituntaskan. Belum lagi kemunduran pemberantasan korupsi dengan adanya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK).

Peran Anak Muda

Anak muda nggak bisa dipisahkan dari semangat gerakan dan perubahan. Lewat berbagai konsolidasi, mahasiswa dan pelajar di berbagai kota membicarakan masa depan demokrasi Indonesia yang bisa terus-terusan mundur kalau nggak dicegah. Dengan caranya masing-masing, anak muda menunjukkan rasa jengah atas kekuatan oligarki, alias sekelompok orang yang berkuasa, makin menjadi.

Di aksi ini salah satu pemain penting selain mahasiswa adalah pelajar Sekolah



Riset Mandiri yang dikelola oleh Tirto, berjudul Gen Z Bukan Generasi Apolitis menyebutkan kalau peserta aksi #ReformasiDikorupsi yang terdiri dari pelajar usia SMA dan kuliah memiliki perhatian pada isu revisi Rancangan RKUHP, Revisi UU KPK, dan rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Menengah Kejuruan (SMK). Sejak remaja berseragam putih abu abu memadati jalan dengan slogan 'STM Bergerak' banyak orang yang mengira mereka cuma ikut-ikutan atau menyalurkan *adrenaline rush* saja, yang belum tentu tepat. Padahal pelajar SMK sudah familiar dengan gerakan, buktinya ada satu aliansi bernama Fijar alias Federasi Pelajar Jakarta yang berperan pada aksi 25 September dan setelahnya.

Pelajar dan mahasiswa yang bergabung dalam massa aksi menghadapi tantangan yang serupa, yaitu pertanyaan dari generasi tua apakah mereka mengerti isu yang sedang terjadi. Pemahaman tentang isu ternyata bisa dijawab dengan cukup baik oleh generasi Z. Riset Mandiri yang dikelola oleh Tirto, berjudul Gen Z Bukan Generasi Apolitis menyebutkan kalau peserta aksi #ReformasiDikorupsi yang terdiri dari pelajar usia SMA dan kuliah memiliki perhatian pada isu revisi Rancangan RKUHP, Revisi UU KPK, dan rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Anak muda paham isu lewat berbagai kanal informasi yang mereka serap sehari-hari. Internet bikin mereka mengerti kalau aktivisme itu ada banyak sekali bentuknya. Aksi #ReformasiDikorupsi juga jadi wadah penting untuk belajar bahwa aktivisme digital dan *on ground* atau di dunia nyata sama-sama mendukung gerakan. Aktivisme digital mampu menggerakkan lebih banyak anak muda untuk turun ke jalan.

Kita bisa melihat usaha anak muda mendukung penyebaran informasi secara digital, seperti titik kumpul aksi, letak jalur evakuasi, penyaluran logistik,

lokasi ambulans, penggalangan dana online, sampai membasmi tudingan *buzzer* yang berusaha melemahkan gerakan. Selain itu membuat *meme* di media sosial untuk menunjukkan kritik terhadap pemerintah juga menunjukkan kalau anak muda meleak keadaan politik.

Anak muda juga sering dikecilkan sebagai bagian dari *clicktivism*, alias hanya klak-klik saja sudah jadi aktivis, atau *cloutivism*, ikut-ikutan jadi aktivis agar dapat banyak *likes* dan *followers*. “Pertarungan mereka belum tentu lebih mudah, harus berhadapan dengan *hoax*, monopoli informasi, dan *buzzer*,” ujar Lola Kaban, aktivis muda antikorupsi, menanggapi tuduhan soal perjuangan pelajar dan mahasiswa saat ini. Belum lagi lawan yang dihadapi ini tentu saja dimotori oleh sokongan dana dari pihak yang berkepentingan dan terganggu akibat aksi-aksi masyarakat sipil, sedangkan aliansi pelajar dan mahasiswa hanya mengandalkan penggalangan dana solidaritas yang jumlahnya terbatas.

Demonstrasi skala nasional ini membuat pemerintah menunda pengesahan beberapa undang-undang. Setidaknya pemerintah menyatakan lima RUU tidak disahkan pada masa DPR periode 2014-2019. RUU tersebut di antaranya RKUHP, RUU Pertanahan, Minerba, Pemasarakatan dan Ketenagakerjaan.

Represivitas Aparat

Di balik kemenangan kecil aksi #ReformasiDikorupsi ada tindakan represif pemerintah lewat aparatnya yang perlu jadi catatan penting. Lima orang anak muda gugur di aksi massa 24-30 September akibat kekerasan yang terjadi selama aksi. Mereka adalah Immawan Randi, Muhammad Yusuf Kardawi, Maulana Suryadi, Bagus Putra Mahendra, dan Akbar Alamsyah. Polisi juga menangkap 1.365 orang demonstran dan menahan 179 orang di antaranya yang berdemo di depan Gedung DPR pada 30 September 2019.

Yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa perjuangan ini belum selesai. Kita harus saling jaga dan bantu. Masih ada banyak tuntutan yang belum terpenuhi. Belum lagi Omnibus Law yang bergulir, yang bikin oligarki makin berkuasa. Sudah siap untuk turun ke jalan lagi?

Referensi:

- Adam, Aulia. (2019). Tirto.id: Memahami Peran Gen Z dalam Aksi #ReformasiDikorupsi di DPR. Diakses pada 20 Februari 2020 dari tautan: <https://tirto.id/eiNt>.
- 22 Indo Barometer. (2018). Indo Barometer: Evaluasi 20 Tahun Reformasi. Diakses pada 20 Februari 2020 dari tautan: [https://www.indobarometer.com/publish/admin/file/content/201805201532-survei-RILIS%20INDO%20BAROMETER_EVALUASI%2020%20TAHUN%20REFORMASI%20\(APRIL%20%202018\).pdf](https://www.indobarometer.com/publish/admin/file/content/201805201532-survei-RILIS%20INDO%20BAROMETER_EVALUASI%2020%20TAHUN%20REFORMASI%20(APRIL%20%202018).pdf)
- Gerintya, Scholastica. (2019). Tirto.id: Gen Z Bukan Generasi Apolitik: Survei Aksi “#ReformasiDikorupsi”. Diakses pada 20 Februari 2020 dari tautan: <https://tirto.id/ei7G>.



Menguliti Undang-Undang yang Mengadi-Ngadi

Oleh: Siti Rahayu

Tuntutan aksi #ReformasiDikorupsi menolak beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), satu Undang-Undang (UU), dan dukungan pengesahan dua RUU. Sudah tahu belum isi RUU dan UU yang masuk tuntutan aksi itu soal apa?

RKUHP

RUU KUHP ini dianggap sebagai salah satu undang-undang yang ngawur. Saat ini, RUU KUHP sudah sampai di tahap pembahasan Tingkat II. Hanya saja, dilakukan penundaan sejak masa sidang terakhir DPR 2014-2019. Sampai saat ini, belum ada kejelasan apakah RKUHP ini akan disahkan dalam paripurna atau dikembalikan pembahasannya di tahap pembicaraan Tingkat I.

Banyak banget yang bilang kalau pasal-pasal dalam RUU ini lebih kolonial dibanding KUHP yang sudah berlaku sejak zaman Belanda dulu. Sebab, ada banyak pasal yang dianggap bermasalah. Beberapa pasal dianggap bermasalah menurut Intitute Criminal Justice Reform (ICJR), karena pasal dalam RKUHP ini menyimpang dari asas-asas hukum pidana, terlalu jauh mengatur urusan privat, tidak mencerminkan adanya demokrasi, dan menimbulkan kriminalisasi yang tidak jelas.

ICJR merangkum tiga belas poin bermasalah menurut naskah RKUHP versi 28 Agustus 2019, yaitu (1) pengaturan soal living law; (2) ketentuan hukuman mati; (3) ketentuan makar; (4) kriminalisasi tindak pidana contempt of court; (5) ketentuan penghinaan; (6) ketentuan penghinaan lembaga negara; (7) ketentuan tindak pidana agama; (8) kriminalisasi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan; (9) kriminalisasi pengenalan alat kontrasepsi; (10) kriminalisasi aborsi; (11) ketentuan soal narkoba yang bermasalah; (12) ketentuan soal korupsi yang bermasalah; (13) ketentuan soal pelanggaran HAM berat yang bermasalah.

Ga cuma isi RUU nya yang bermasalah, ternyata proses penyusunan RUU ini juga banyak menyimpang dari ketentuan penyusunan undang-undang yang ada. Dari obrolan dengan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi, permasalahan mendasar dalam proses pembahasan RKUHP ini adalah minimnya keterlibatan publik dan publikasi draft RUU. Padahal, kedua hal itu sudah menjadi kewajiban dari pemrakarsa suatu RUU yang sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014.

RUU Pertanahan

Selanjutnya, ada RUU Pertanahan yang pada masa sidang terakhir DPR 2014-2019 juga sampai di tahapan pembahasan Tingkat II. Namun, RUU Pertanahan belum disahkan karena mendapat banyak kritik dan penolakan. Pada 2020, RUU Pertanahan kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Meski begitu, hingga saat ini belum ditentukan apakah RUU ini akan langsung disahkan atau akan kembali membuka peluang pembahasan untuk pasal-pasal tertentu di dalamnya.

Di awal pengusulannya, RUU Pertanahan ini sebenarnya memiliki arti yang begitu

luhur. RUU Pertanahan diamanatkan oleh UUD 1945 dan UUPA (Pokok-pokok Pembaruan Agraria) 1960. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai salah satu organisasi yang fokus pada isu ini menyebutkan jika sebenarnya RUU ini diharapkan bisa mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran rakyat. Selain itu, RUU ini bisa menerjemahkan kedaulatan bangsa Indonesia atas wilayahnya.

Harapan tinggal harapan. Nyatanya di kursi-kursi dewan yang lahir justru peraturan yang menguntungkan korporasi besar dan pemilik modal. Reforma agraria yang diharapkan bisa menguntungkan kelompok petani, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat miskin kota malah salah sasaran. Undang-undang yang diimpikan bisa sejalan dengan reforma agraria justru membuka peluang bagi mafia tanah dan para elit. Bahkan, muncul pasal yang mengatur masalah pasar tanah, pasal pemutihan bagi korporasi besar, dan pasal pemidanaan yang rentan mengkriminalisasi rakyat.

Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh kita untuk memperbaiki isi RUU Pertanahan yang bermasalah ini? Saat mengobrol ringan, Fajri memberikan saran. Menurutnya perlu ada kampanye kembali masyarakat sipil dilibatkan dalam pembahasan karena dengan adanya keterlibatan dari beberapa pihak maka bisa saja pasal-pasal yang mengalami penolakan akan diperbaiki atau bahkan digugurkan.

RUU Pemasyarakatan

Satu lagi RUU bermasalah yang ditolak saat aksi Reformasi Dikorupsi adalah

RUU Pemasyarakatan. RUU ini kembali masuk Prolegnas 2020. Namun, lagi-lagi masih belum diketahui akan melanjutkan proses sebelumnya atau mengulang ke pembahasan. Jika melanjutkan proses sebelumnya, RUU ini tinggal disahkan saja..

UU Pemasyarakatan yang kita punya memang sudah usang yaitu UU No. 12 Tahun 1995. Awalnya perubahan UU Pemasyarakatan dimaksudkan untuk merespon kondisi pemasyarakatan di Indonesia saat ini. Salah satu masalah dalam pemasyarakatan saat ini yaitu kondisi overcrowding yang semakin tahun semakin meningkat. Maka, diharapkan dengan adanya RUU Pemasyarakatan bisa diusulkan adanya konsep baru bagi narapidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas, yaitu konsep pembinaan di luar lapas dengan semangat keadilan restoratif.

Eits, tapi tragis banget nih. Proses pembentukan dan perancangan UU Pemasyarakatan masih tertutup dan tidak banyak melibatkan masyarakat sipil. Selain itu, kritik juga muncul karena RUU ini masih berorientasi pada penjara dibanding pembinaan luar lapas. RUU ini juga dianggap tidak terkoneksi secara baik dengan undang-undang lain. Akibatnya, banyak bentuk hukuman 'baru' misalnya perintah konseling dalam UU PKDRT yang luput dimuat. Kemudian, aspek pemenuhan HAM bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, difabel, orang dengan disabilitas psikososial, terpidana mati sampai aspek kesehatan bagi ODHA juga belum diatur dengan komprehensif dalam RUU ini. Pasal mengenai kebutuhan aspek perempuan misalnya,

hanya diatur dalam dua pasal: Pasal 61 dan Pasal 62.

RUU Ketenagakerjaan – RUU Cipta Kerja

Masih ada lagi RUU bermasalah lainnya, RUU Ketenagakerjaan. Nah, RUU ini kembali masuk Prolegnas 2019-2024. Tetapi, ga masuk Prolegnas 2020. Lho, kok bisa? Sebentar, sebelum ke situ kita cari tahu dulu kenapa sih RUU ini sempat ditolak habis-habisan oleh peserta aksi #ReformasiDikorupsi?

Kalau dari nama undang-undangnya, harusnya RUU ini membawa dampak positif bagi pekerja kan? Namun, jangan mau dikibulin. RUU ini justru lebih berpihak kepada perusahaan. Hak dan kesejahteraan pekerja justru dipangkas habis-habisan oleh anggota dewan dan pemerintah. Mulai dari rencana dihapuskannya aturan cuti haid, lalu perpanjangan syarat minimum pesangon menjadi sembilan tahun, batas waktu kenaikan upah minimum menjadi dua tahun sekali, hingga kontrak kerja yang awalnya tiga tahun menjadi lima tahun semakin menghimpit posisi pekerja.

Namun, RUU Ketenagakerjaan ini ga masuk Prolegnas 2020. Jangan tenang dulu, masalah lain justru muncul saat RUU Cipta Lapangan Kerja digaungkan. RUU ini, menurut Fajri secara substansi bersinggungan dengan RUU Ketenagakerjaan. Jadi, jika RUU Cipta Lapangan Kerja disahkan dan dianggap cukup untuk mengatur masalah ketenagakerjaan maka bisa jadi RUU Ketenagakerjaan tidak akan disahkan hingga akhir masa DPR periode ini.

Meski RUU ini belum masuk dalam

tuntutan aksi #ReformasiDikorupsi kemarin karena baru muncul pada awal 2020, ia sudah disambut dengan kritik dan protes yang banyak disuarakan oleh banyak pihak. Karena lagi-lagi, isi RUU ini bermasalah. Ya, ga beda jauh dengan RUU Ketenagakerjaan, RUU Cilaka ini juga banyak merugikan pekerja. Bahkan lebih jauh RUU ini akan sangat berpihak bagi perusahaan dan pemodal.

Ada beberapa kritik dan protes yang muncul atas RUU Cilaka ini yaitu: (1) aturan yang pro terhadap pihak perusak lingkungan; (2) pembentukan yang tertutup dan tidak melibatkan masyarakat sipil; (3) celah korupsi semakin besar; (4) rentan perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat atas nama kepentingan pembangunan dan ekonomi; (5) mendorong perbudakan modern dengan fleksibilitas tenaga kerja lewat penetapan upah minimum per jam dan perluasan outsourcing; (6) potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja; (7) kecenderungan untuk memiskinkan dan mengkriminalisasi kelompok rentan dan rakyat.

RUU Minerba

Masih lanjut lagi dengan satu RUU bermasalah lainnya, ada RUU Mineral dan Batubara alias RUU Minerba. RUU ini masuk Prolegnas 2020. RUU ini diprotes dan ditolak oleh peserta Aksi Reformasi Dikorupsi karena dianggap hanya dijadikan upaya untuk melegalisasi eksploitasi kekayaan alam kita oleh perusahaan saja. Benar ga, sih?

Nyatanya, isi dari RUU ini memang memuat beberapa ketentuan yang cenderung memberikan peluang bagi

perusahaan untuk mengambil kekayaan alam yang ada. Aturan dalam RUU ini bahkan cenderung mengabaikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat sekitar. Selama proses pembahasan RUU, DPR juga sangat tertutup. Padahal masyarakat sipil dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan seharusnya ikut dilibatkan. Karena RUU ini menyangkut hajat hidup mereka yang tinggal di kawasan pertambangan. Parahnya, masyarakat sekitar pertambangan justru rentan dikriminalisasi lewat RUU ini.

Selain itu, muncul juga kecurigaan karena proses pembahasan RUU ini dianggap sangat cepat. Ada anggapan jika RUU ini hanya bentuk “balas budi” atas perusahaan tambang yang berkontribusi saat kampanye politik. Ya, tujuannya apalagi kalau bukan untuk memudahkan perusahaan tambang memperpanjang masa kontrak dengan lebih mudah dan cepat.

Bahkan, RUU ini justru mendukung perusahaan dibanding perlindungan lingkungan. Salah satunya lewat aturan insentif bagi perusahaan yang membangun tenaga listrik tenaga uap batubara. Kemudian, tanggung jawab perusahaan dikurangi dalam melakukan upaya perbaikan lahan bekas tambang dengan menjadikannya irigasi atau objek wisata.

UU KPK

Satu lagi yang diprotes saat aksi #ReformasiDikorupsi kemarin adalah revisi UU KPK yang sudah disahkan, yaitu UU No. 19 Tahun 2019. Sejak masih menjadi RUU, aturan ini banyak mendapat kritik dan protes. Bukan cuma dari kelompok masyarakat sipil atau mahasiswa, bahkan KPK sendiri secara kelembagaan ikut memprotes aturan ini. Ya jelas dong diprotes, secara aturan yang ada dalam undang-undang ini sangat berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan justru menguntungkan koruptor.

Nih, satu poin utama yang banyak diprotes adalah kemunculan Dewan Pengawas. Belum familiar kan dengan istilah itu? Jadi, ide Dewan Pengawas ini tiba-tiba muncul dengan alasan KPK perlu untuk diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan karena KPK dianggap sebagai lembaga superboddy selama ini. Ya, tujuannya baik sih. Tapi kenyataannya, jangan ditanya. Pasal yang mengatur Dewan Pengawas justru memberi peluang besar pelemahan KPK.

Dewan Pengawas secara ajaib memiliki tugas untuk memberi izin terhadap penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK. Nah, ini tentu saja memperlambat jalannya upaya pemberantasan korupsi. Karena jika izin tidak diterbitkan, maka KPK tidak boleh melakukan upaya-upaya di atas untuk memeriksa adanya dugaan korupsi. Buktinya sudah ada, penggeledahan kantor DPP PDIP Januari lalu tidak diizinkan oleh Dewan Pengawas.

Selain itu, coba deh cermati poin-poin lainnya dalam revisi UU KPK yaitu (1) KPK enggak lagi menjadi lembaga independen; (2) KPK ga boleh membuka kantor perwakilan di daerah; (3) KPK diberi kewenangan untuk menghentikan perkara; (4) pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum; (5) pegawai KPK akan berstatus ASN; (6) hilangnya independensi KPK saat merekrut penyidik; dan (7) hilangnya kewenangan KPK mengangkat penyidik independen;

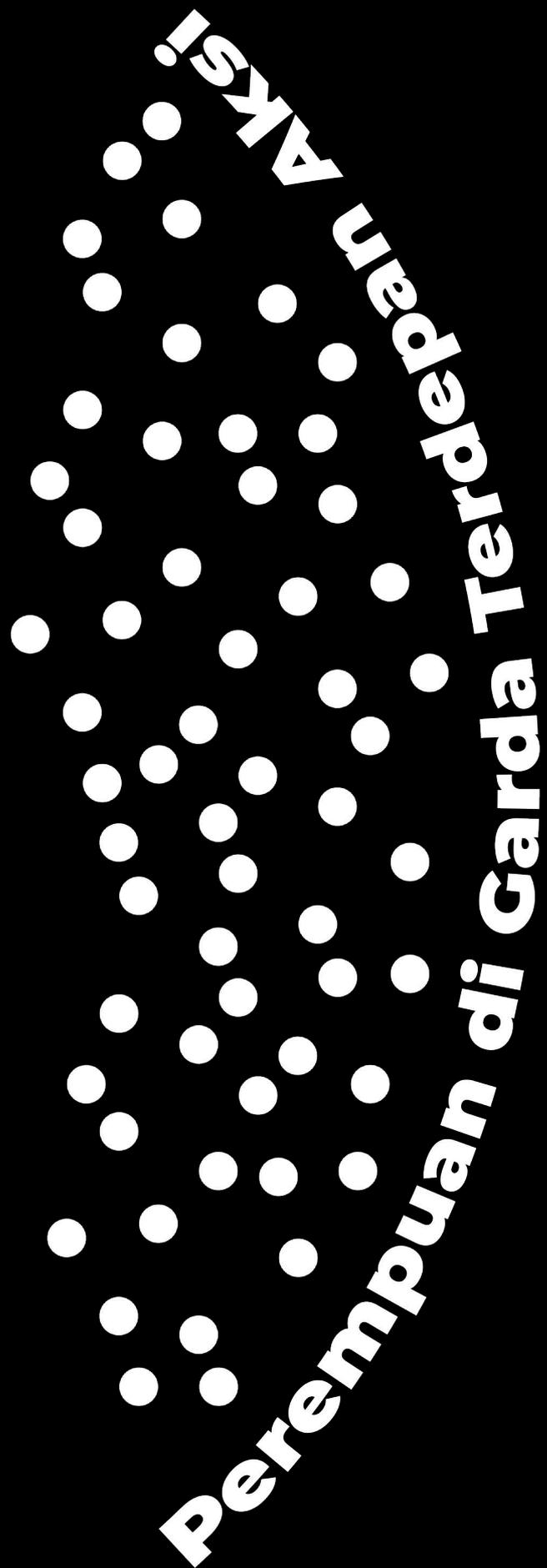
Selain isi undang-undangnya, proses pembuatan undang-undang ini juga banyak dikritik. Jangka waktu pembuatan undang-undang ini tergolong singkat atau memang sengaja diburu-buru? Selain waktu yang singkat, proses pembuatan yang tertutup dan menyulitkan masyarakat sipil untuk berpartisipasi juga menjadi kritik. Selama pembuatan undang-undang, masyarakat sipil tidak dilibatkan bahkan untuk mengakses draf aturannya saja sudah mengalami kesulitan. Maka, wajar saja jika akhirnya undang-undang ini dipenuhi protes dan kritikan yang tidak henti-hentinya digaungkan.

Itu dia RUU dan UU yang mendapat kritik, protes, dan penolakan dari peserta aksi #ReformasiDikorupsi kemarin. Setelah tahu isinya dan proses pembuatannya, berasa wajar kan kalau memang RUU dan UU itu ditolak. Jadi, jangan sampai cuma ditunda pengesahannya saja. Aturan yang tidak demokratis dan tidak sejalan dengan HAM memang seharusnya ditolak. Meski negara kita negara hukum, bukan berarti aturan hukum yang ada bisa seenaknya mengesampingkan demokrasi dan HAM yang ada.

Referensi

- Akbar, Caesar. (2020). Tempo.co: Kontroversi RUU Pemasarakatan dan Pertanahan dalam Prolegnas. Diakses dari tautan: https://nasional.tempo.co/read/1296210/kontroversi-ruu-pemasyarakatan-dan-pertanahan-dalam-prolegnas?page_num=2.
- Arigi, Fitri. (2019). Tempo.co: 13 Poin yang Bermasalah dalam RKUHP Versi ICJR. Diakses dari tautan: <https://nasional.tempo.co/read/1242031/13-poin-yang-bermasalah-dalam-rkuhp-versi-icjr>.
- Azis, Ibnu. (2019). Tirto.id: Download PDF Isi RUU Pemasarakatan 2019 yang Memanjakan Koruptor. Diakses dari tautan: <https://tirto.id/eiQk>.
- DA, Adi Thea. (2020). Hukum Online: 12 Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja. Diakses dari tautan: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3474fe03a84/12-alasan-koalisi-masyarakat-sipil-tolak-ruu-cipta-lapangan-kerja/>.
- DA, Adi Thea. (2019). Hukum Online: Bermasalah, Pembahasan RUU Minerba Diminta Libatkan Masyarakat. Diakses dari tautan: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8c85104537a/bermasalah--pembahasan-ruu-minerba-diminta-libatkan-masyarakat>.
- ICJR. (2018). ICJR: Catatan dan Rekomendasi ICJR atas 9 RUU Terkait Kebijakan Pidana dalam Program Legislasi Nasional 2019. Diakses dari tautan: <https://icjr.or.id/catatan-dan-rekomendasi-icjr-atas-9-ruu-terkait-kebijakan-pidana-dalam-program-legislasi-nasional-2019/>.
- ICJR. (2019). ICJR: ICJR Tolak Pembahasan RUU Pemasarakatan. Diakses dari tautan: <https://icjr.or.id/icjr-tolak-pembahasan-ruu-pemasyarakatan/>.
- KPA. (2018). KPA: Pandangan dan Usulan: Rancangan Undang-undang Pertanahan untuk Pelaksanaan Pembaruan Agraria. Diakses dari tautan: <http://kpa.or.id/publikasi/download/45463-pandangan-kpa-terhadap-ruu-pertanahan.pdf>.
- Kumparan. (2019). Kumparan: UU KPK Baru: Dewan Pengawas Dibentuk, Tim Penasihat Dibubarkan. Diakses dari tautan: <https://kumparan.com/kumparannews/uu-kpk-baru-dewan-pengawas-dibentuk-tim-penasihat-dibubarkan-1rscAVkdhOI>.
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. (2019). Detik.com : Duh! Ini 15 Kelemahan KPK di UU Baru. Diakses dari tautan: <https://news.detik.com/berita/d-4719167/duh-ini-15-kelemahan-kpk-di-uu-baru/4>.
- Putsanra, Dipna Videlia. (2019). Tirto.id: Isi RUU Bermasalah Didemo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta & Kota Lain. Diakses dari tautan: <https://tirto.id/eiCs>.
- Setiawan, Riyan. (2019). Tirto.id: Isi Pasal Bermasalah UU KPK No.19/2019 yang Sudah Berlaku. Diakses dari tautan: <https://tirto.id/ej8o>.

ISKRA Perempuan di Garda Terdepan



Oleh: Rosa Vania

Pamflet mewawancarai beberapa perempuan yang terlibat dalam aksi Reformasi Dikorupsi dan menanyakan tantangan yang dihadapi perempuan selama aksi yang sampai saat ini masih sangat maskulin.

“Yang Perempuan Mundur!”

Apa yang ada di dalam benakmu waktu ikut aksi yang dihadap oleh aparat yang sudah bersiap-siap dengan gas air mata lalu kamu diminta mundur hanya karena kamu seorang perempuan? *Nggak* enak banget, kan? Ya, mungkin kalau memikirkan keselamatan, semua orang yang ikut aksi dan sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja secara fisik maupun psikologis sebaiknya mundur dan mencari pertolongan. Namun, bukan karena identitasnya sebagai perempuan.

Seruan perempuan agar mundur sempat terjadi di aksi #ReformasiDikorupsi, demonstrasi yang disebut-sebut terbesar setelah aksi mahasiswa dan masyarakat sipil tahun 1998. Itu yang terekam dalam ingatan Irine Wardhanie, salah satu koordinator lapangan bagi koalisi masyarakat sipil pada aksi 24 September 2019. “Aku dengar satu suara dari teman mahasiswi dan kelompok sipil ketika mereka disuruh mundur, mereka bilang: kenapa harus kita yang mundur? Kita mau maju,” kata Irine. Akhirnya mereka ada di garis depan juga.

Pengalaman lain yang ditangkap Nisrina Nadhifah soal perempuan dalam aksi, yaitu kurangnya perhatian yang diberikan massa aksi ketika ada perempuan yang berorasi di mobil komando. “Banyak laki-laki di sekitarnya yang *nggak* tahu dia ngomong apa-apa, padahal substansinya penting,” ujar Ninies. Dalam kesempatan menyampaikan pendapat itu pun perempuan sedang berjuang untuk mendorong demokrasi jadi milik bersama.

Jumlah perempuan yang lebih sedikit *nggak* terlalu dipermasalahkan Lini Zurlia, anggota Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi (AMUK), kalau isi dan makna kehadiran perempuan memang bernilai. “Menurutku, kelompok perempuan penting ada di ruang-ruang ini, karena kitalah yang akan membawa isu perempuan ke dalamnya.

Gerakan ini kan sangat maskulin. Kalau kita tidak ada, tidak akan ada yang ingat dan akan terlewatkan begitu saja,” kata Lini.

Kita perlu refleksi juga, pengalaman perempuan semacam ini terjadi karena di pucuk-pucuk kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) belum banyak perempuan yang dapat akses. Coba sama-sama berhitung, ada berapa jumlah ketua BEM perempuan di Indonesia? Pun begitu, perempuan masih jarang menjadi koordinator lapangan atau korlap ketika ada aksi besar. *Nggak* heran pendekatan yang dilakukan oleh mahasiswa kebanyakan adalah menempatkan perempuan sebagai subjek yang lemah dan butuh diselamatkan, alih-alih bertahan.

Selain dipukul mundur saat aksi, isu khas perempuan juga sering kali *nggak* diperhitungkan karena dianggap kurang relevan dan mendesak. Ini terjadi waktu ada perdebatan soal masuk atau *nggaknya* Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di dalam tuntutan aksi. Ada BEM kampus yang *nggak* memasukkan isu ini. Namun, lama-lama beberapa pihak menyadari kalau perlindungan perempuan dari kekerasan seksual itu perlu didukung. Ini *nggak* hanya untuk melindungi perempuan, tapi seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai gender dan orientasi seksual.

Ini Tempat Perempuan Juga

Bagi perempuan, berada di garda terdepan mungkin terasa asing. Polisi yang dikerahkan

Aku dilecehkan secara verbal
ketika sedang berorasi di aksi
#ReformasiDikorupsi di Bandung

Ada 2 mahasiswa yang berteriak
"Hidup ayam kampus!" "Hidup lonte!"
ketika aku berorasi. Aku berdiri disana untuk
menuntut disahkannya RUU PKS, dan dilecehkan.

Ini kenapa kita butuh RUU PKS sekarang.
Perempuan dan minoritas butuh keamanan
untuk menjadi dirinya di segala ruang
tanpa dilecehkan.

-Vera



[Postingan Instagram @Indonesiafeminis (18/2)]

dalam aksi massa kebanyakan laki-laki, anggota massa aksi juga. Keterwakilan perempuan dalam aksi-aksi besar memang tak sebanyak laki-laki. Namun, bukan berarti perempuan *nggak* boleh mengklaim posisinya di ruang publik. "Arena aksi itu adalah arena yang masih sangat maskulin, sehingga kita para puan harus merebut ruang-ruang itu," ujar Lini.

Ninies menyebutkan kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang *nggak* bisa diakses perempuan selama ikut aksi yang bisa bikin akses perempuan terbatas buat ikut aksi. "Harus diakui perempuan punya keadaan spesifik yang tidak dimiliki laki-laki," ujarnya. Contohnya, sanitasi yang baik, yakni toilet buat perempuan yang sedang menstruasi. Ketika itu *nggak* bisa diakses, bisa jadi ada perempuan-perempuan yang urung atau merasa tidak diberi ruang.

Di belahan dunia manapun, identitas perempuan adalah identitas politis. Mau *nggak* mau ketika dilahirkan sebagai perempuan, seseorang harus selalu berjuang untuk hidup di dunia patriarkis. Ketika pergi ke luar rumah pun berjuang karena pakaian dan penampilan perempuan selalu jadi penilaian utama.

Menilik aksi di negara tetangga, seperti Hong Kong, ada perempuan yang sering disebut 'Hong Kong Girls'. Stereotip yang melekat adalah mereka hanya peduli pada penampilan dan gaya hidup materialistik. Namun, mereka *nggak* mau diberi label sebagai *basic bitch* seperti itu karena sangat merendahkan. *Bitch* yang mereka ingin definisikan ulang adalah: perempuan yang melawan. Itu yang bikin mereka turun ke jalan. Mereka berhasil menyebarkan pesan, *kalo para basic bitch* yang pakai rok dan sepatu berhak itu sampai ikut aksi, berarti ada yang gawat.

Gak ingin diremehkan, para perempuan Hong Kong ini *nggak* segan-segan berada di garda terdepan aksi, alias jadi *frontliner*. Mereka menendang balik granat gas air mata, membuat barikade, dan berdiri di garda terdepan untuk menghadapi polisi bersenjatakan peluru karet dan senjata anti huru-hara. Aksi mereka menunjukkan kalau ruang demonstrasi adalah tempat mereka juga.

Pengalaman di Hong Kong di mana perempuan bisa menjadi diri mereka sendiri bisa jadi pelajaran untuk demonstrasi di Indonesia. "Kita harus mempromosikan demo itu hak semua orang. Justru demonstrasi adalah ruang bersama yang bisa digunakan oleh banyak orang untuk berekspresi," kata Ninies.

Belum Jadi Ruang Aman?

Kalau ditelusuri, ada beberapa hal yang menghalangi perempuan berada di garda terdepan aksi. Ancaman pelecehan seksual jadi hal yang ditakutkan perempuan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual bisa bermacam-macam banget, contohnya dipegang secara fisik, di-*catcall*, maupun difoto diam-diam dan disebarkan ke grup atau medsos. Jika belum sempat maju ke depan saja udah digituin, gimana ingin lanjut aksi.

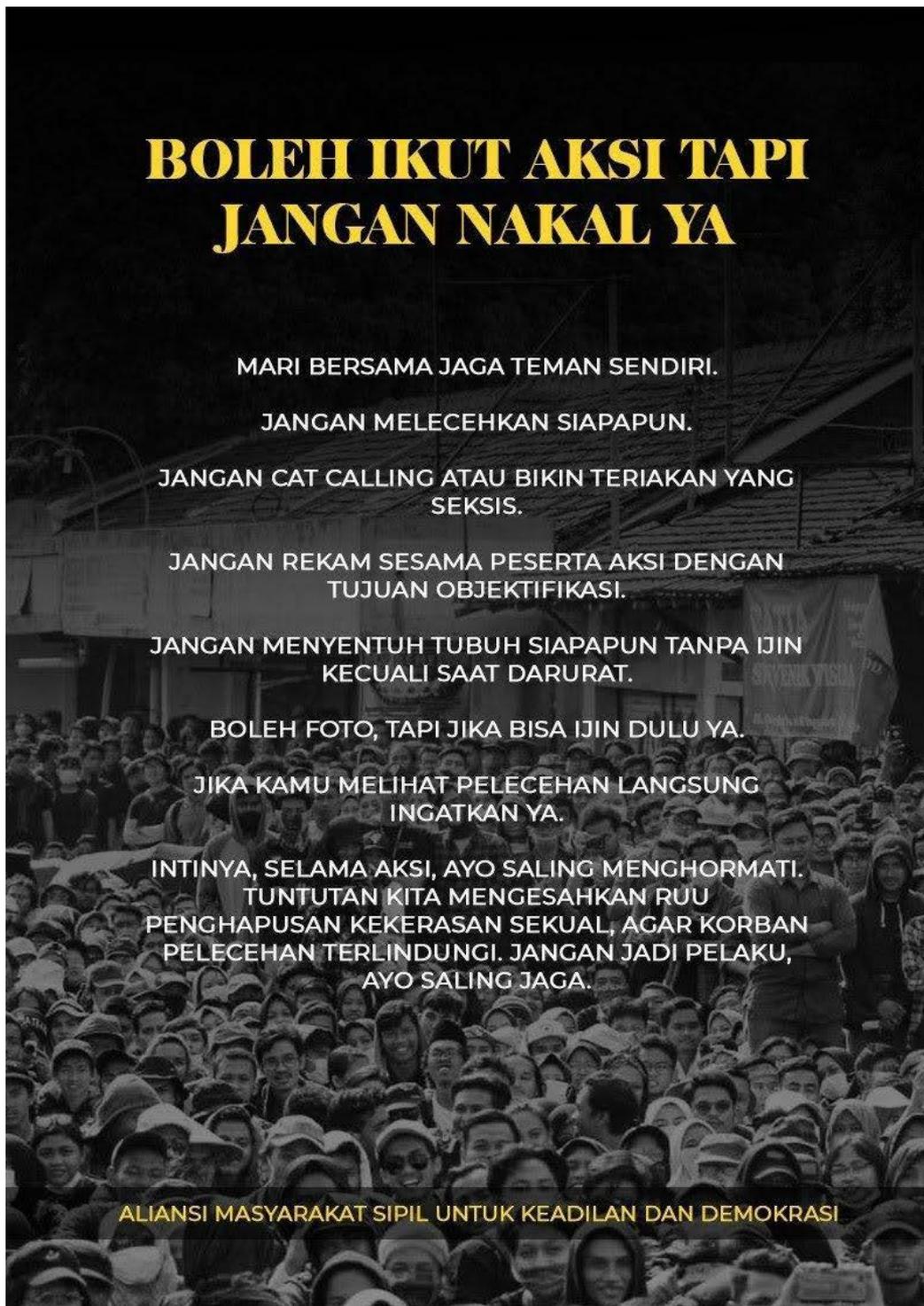
Pengalaman pelecehan seksual dialami oleh beberapa peserta aksi. Mereka bahkan dipanggil-panggil dengan nada merendahkan oleh sesama peserta aksi. Selain karena sangat mengganggu, hal ini menunjukkan kalau belum ada kesadaran bersama soal penghargaan terhadap entitas lain. Pelaku pelecehan lain adalah aparat. Mereka yang berada di sekitar tempat aksi, duduk-duduk santai dan bergerombol juga bisa jadi pelaku.

Ada sebuah pengakuan mahasiswi yang diposting akun Instagram @Indonesiafeminis pada Selasa (18/2). Ia bercerita kalau saat berorasi ada dua mahasiswa yang teriak "Hidup ayam kampus!" "Hidup lonte!" Bentuk penghinaan besar buat perempuan yang memberanikan dirinya berbicara di depan teman-temannya sesama mahasiswa. Ironis sekali karena ia berdiri di sana untuk mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Mengetahui perempuan belum aman selama aksi bersama, penyelenggara dan massa aksi juga harus lebih sensitif dan mengevaluasi diri. Bukan cuma perempuan yang seharusnya membela dirinya ketika jadi korban di situasi seperti itu. Ketika jadi bagian massa aksi, seseorang yang percaya dengan demokrasi dan kesetaraan seharusnya mendukung perempuan

atau kelompok minoritas yang mengalami pelecehan. Kita tidak bisa diam saja. Kita semua punya peran buat menghapus kekerasan seksual. Kalau di tuntutan aksi ada poin mendesak pengesahan RUU P-KS masa saat aksi *nggak* saling jaga dan saling tolong?

Untuk memperjuangkan nilai-nilai dan menunjukkan bahwa hak-hak perempuan perlu didengar, seseorang *nggak* harus membahayakan diri. Kalau memang secara fisik, psikologis, maupun peralatan perlindungan diri memadai, semua orang bisa siap berada di keadaan berbahaya, bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya. Tidak berada di garda terdepan pun sebetulnya tidak masalah karena dukungan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun, jika perempuan memutuskan untuk berada di depan saat aksi mereka punya hak untuk memperjuangkan suaranya.



**+
+
+
Paramedis Jalan:
Bagian dari Massa Aksi
+
+
+**

Oleh: Firman Maulana

Pada 24 September 2019, terjadi kerusuhan dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Bentrok antara massa aksi dengan aparat membuat korban berjatuh. Penyebab terbanyak adalah karena gas air mata yang berlebihan dilemparkan oleh aparat kepada massa aksi. Banyak massa serta warga sipil non demonstran yang direpresi. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa aparat memang tidak pernah berhenti menunjukkan brutalitas mereka. Dari hal tersebut pula massa aksi pun belajar, bahwa mereka butuh *healing support* untuk melindungi massa aksi dari kebrutalan aparat. Karena hal tersebut pula muncullah paramedis jalanan.

Paramedis jalanan adalah kolektif yang menolong massa aksi yang terluka saat demonstrasi berlangsung. Mereka memiliki fungsi *healing* serta menjadi tumpuan saat kerusuhan berlangsung. Ia muncul dari massa aksi yang sadar bahwa massa aksi kekurangan tim medis. Sebagian dari mereka adalah dokter, bekerja di klinik, buruh, dan kebanyakan mahasiswa.

Paramedis jalanan memiliki prinsip bahwa siapapun yang mengklaim diri sebagai paramedis dan ingin membantu massa aksi adalah bagian dari paramedis jalanan. Saat aksi, tidak semua dari mereka yang menjalankan perannya sebagai medis. Sebagian dari mereka melindungi tim medis dengan membuat *border* serta membawa massa aksi yang pingsan atau tidak mampu berjalan ke posko terdekat. Tim ini juga ikut memperlambat barikade polisi agar massa aksi memiliki waktu untuk evakuasi.

Walau begitu, paramedis jalanan pun juga tidak urung terkena sikap represif dari polisi. Tanggung jawab yang besar serta taruhan berupa nyawa membuat mereka harus lebih berani lagi dari massa aksi yang lainnya. Tak tanggung, beberapa massa yang menjadi paramedis jalanan lalu harus mengalami trauma kepanjangan. Beberapa dari mereka juga harus menjalani terapi untuk mengobati mental mereka.

Tim ini berharap masyarakat bisa turut membantu saat aksi. Masyarakat pun tergabung bukan hanya sekedar peduli isu tertentu yang sedang berkembang. Seperti misalnya hanya ikut tergabung saat isu RKUHP namun enggan membantu saat isu Omnibus Law. Masyarakat tergabung menjadi bagian dari paramedis jalanan

karena mereka punya kepedulian bahwa siapapun korbannya, mereka membutuhkan pertolongan.

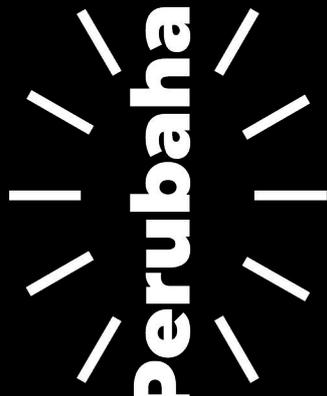
Kegiatan paramedis jalanan tidak hanya berhenti pada aksi. Mereka juga ikut turun pada peristiwa lain, seperti banjir di Bekasi serta penggusuran di Tamansari, Bandung. Selain itu, mereka juga pernah mengadakan pelatihan pertolongan pertama saat terjadi kerusuhan saat aksi. Setidaknya, massa aksi dapat menyelamatkan diri sendiri saat terjadi kerusuhan saat aksi.

Massa aksi adalah sebuah bingkai besar yang memiliki banyak kolase, salah satunya adalah paramedis jalanan. Hal tersebut menjadikan mereka menjadi bagian dari massa aksi. Paramedis jalanan menjadi sarana "*healing*" untuk massa aksi. Walau begitu, peran paramedis jalanan tidak serta merta menggantikan peran dokter. Tim ini hanya bisa memberikan pertolongan pertama saat aksi. Jika ada massa yang terluka parah dan membutuhkan dokter, maka paramedis jalanan menjembatani korban dengan rumah sakit terdekat.

“Jika anda percaya revolusi akan terjadi suatu saat nanti, selama mimpi itu tetap ada, kami akan selalu berada di belakang kalian”

Reformasi Dikorupsi:

Generasi Rebahan yang Ingin Perubahan



Oleh: Siti Rahayu

Kalian yang aktif di media sosial pasti sadar kalau September 2019 lalu ramai banget unggahan yang isinya aksi-aksi mahasiswa. Ga hanya media sosial, media massa juga penuh sama pemberitaan dan liputan soal aksi mahasiswa kemarin. Bahkan acara rutin di stasiun televisi ikut mengundang beberapa mahasiswa dan meminta keterangan tentang aksi yang disebut Reformasi Dikorupsi kemarin.

Kenapa bisa begitu ya? Salah satu alasannya mungkin karena ini jadi aksi mahasiswa pertama setelah sebelas tahun lamanya mahasiswa seperti diam-diam saja. Mahasiswa yang rata-rata tergolong generasi Z yang selama ini diklaim sebagai generasi rebahan dan cenderung apatis dengan kondisi negaranya, secara mengejutkan berhasil membuat gerakan yang masif dan meluas.

Generasi Z yang lahir dan besar di tengah kemajuan teknologi digital nyatanya berhasil membuat gerakan yang tidak kalah skalanya dengan aksi mahasiswa di 1998. Karakter generasi Z yang berbeda dengan generasi pendahulunya juga sangat terasa dalam aksi kali ini. Generasi Z yang *santuy*, sarkastik, tapi bermutu justru berhasil mengemas aspirasi dan suara mereka dalam balutan kreativitas.

Apalagi kemahiran dalam memanfaatkan teknologi semakin membuat aksi kemarin *epic*. Mulai dari koordinasi massa aksi lewat *gadget*, penggalangan dana lewat platform digital, hingga penyebaran informasi yang bisa dilakukan dalam hitungan detik. Perpaduan ciamik antara digitalisasi dan kreativitas mahasiswa kemarin semakin menjadi titik pembeda antara gerakan kali ini dengan gerakan sebelumnya.

Nah, untuk kalian yang belum tahu aksi mahasiswa apa saja yang pernah terjadi sebelumnya, simak uraian singkatnya di bawah ini ya.

Pertama, Tritura 1966 yang terjadi menjelang berakhirnya era Orde Lama. Aksi ini berlangsung sejak Januari hingga Maret 1966. Tepatnya selama enam puluh hari. Aksi ini diberi nama Tritura yaitu akronim dari Tiga Tuntutan Rakyat. Seperti namanya, ada tiga tuntutan dalam aksi ini yaitu (1) Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya; (2) Rombak Kabinet Dwikora; (3) Turunkan harga.

Kedua, Malari 1974 yang terjadi di era Orde Baru. Nama Malari atau 15 Januari diambil karena saat itu massa aksi memprotes kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia untuk kepentingan investasi. Saat itu, investasi asing sedang tumbuh subur di Indonesia dan Jepang menjadi salah satu investor terbesar pada masa itu. Mahasiswa kemudian menggelar *long march* dari UI Salemba ke Trisakti Grogol hingga Istana Negara yang menjadi tempat pertemuan Soeharto dan Kakuei Tanaka. Aksi Malari menuntut tiga hal yaitu (1) Hapuskan lembaga Asisten Pribadi Presiden; (2) Turunkan harga; (3) Ganyang korupsi. Aksi ini diwarnai kerusuhan dan pembakaran berbagai hal yang dianggap berbau Jepang. Bahkan, sejumlah mahasiswa ditangkap dan beberapa orang lainnya ditembak.

Ketiga, Reformasi 1998 yang menjadi titik awal lahirnya era Reformasi. Aksi mahasiswa pada Mei 1998 menjadi perwujudan kemarahan atas lemahnya stabilitas ekonomi, langgengnya kekuasaan Soeharto dan matinya demokrasi di Indonesia saat itu. Aksi yang diwarnai kerusuhan mulai dari penjarahan, penangkapan, penculikan, hingga penembakan sejumlah mahasiswa dan aktivis saat itu tentu lekat dalam ingatan. Ada enam tuntutan atau agenda reformasi yang disuarakan yaitu (1) Adili Soeharto dan kroni-

kroninya; (2) Amandemen UUD 1945; (3) Penghapusan Dwi Fungsi ABRI; (4) Otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) Supremasi hukum; (6) Pemerintah yang bersih dari KKN. Puncak aksi sat itu adalah saat sejumlah mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR. Kemudian 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan.

Nah, itulah tiga aksi mahasiswa terbesar lainnya yang sempat terjadi di Indonesia.

Kembali lagi ke Aksi Reformasi Dikorupsi, aksi ini memiliki tujuh tuntutan yaitu (1) Menolak RUU KUHP, Minerba, Pertanahan, Pemasarakatan, Ketenagakerjaan, mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA, mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; (2) Batalkan pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR; (3) Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil; (4) Stop militerisme di Papua dan daerah lain serta segera bebaskan tahanan politik Papua; (5) Hentikan kriminalisasi aktivis; (6) Hentikan pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya; (7) Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan, serta pulihkan hak-hak korban segera.

Terkait aksi kemarin dan tuntutan di atas, Manik Marganamahendra yaitu salah satu peserta aksi kemarin menyempatkan waktunya untuk ngobrol soal dua hal itu. Dari ketujuh tuntutan itu, Manik mengatakan jika sebenarnya aksi kemarin tidak bisa dikatakan memberikan hasil yang cukup baik, namun tetap ada capaian salah satunya adalah penundaan beberapa RUU yang hendak disahkan.

Selain itu, aksi kemarin juga menjadi bukti jika generasi rebahan nyatanya bisa membuat perubahan. Tidak benar jika disebut apolitis dan apatis terhadap masalah sosial-politik di Indonesia. Nyatanya mahasiswa masih punya kepedulian dan sadar bahwa negara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Meski begitu, tetap ada penyesalan karena revisi UU KPK tetap berhasil disahkan dan komisioner KPK yang baru tetap dilantik.

Lebih jauh, obrolan dengan Manik akhirnya menyinggung soal faktor yang membuat aksi ini bisa meluas dan dilakukan di beberapa daerah. Manik menceritakan jika aksi ini bukan aksi hasil sulap semalam. Sebenarnya aksi ini berawal dari kemarahan dan kekecewaan mahasiswa melihat kondisi Indonesia. Mulai dari banyaknya kebakaran lahan, rencana revisi UU KPK dan pemilihan komisioner KPK yang

baru menjadi pemantik kekecewaan mahasiswa saat itu. Itu menunjukkan kalau negara kita tidak dikelola dengan baik, khususnya oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Sebagai generasi Z, Manik juga meyakini jika semangat dan kesadaran mahasiswa saat itu bisa tersebar begitu luas salah satunya karena keberadaan media sosial. Dengan kecanggihan teknologi saat ini akses informasi dan komunikasi yang sangat mudah ikut memberi andil besar dalam menyebarkan isu ini. Dari sini akhirnya banyak yang sadar dan paham jika memang negara ini bermasalah. Setelah kesadaran berhasil disebarkan, maka mulai muncul keinginan untuk ikut bergerak dan turun ke jalan. Itulah alasan banyaknya peserta massa aksi Reformasi Dikorupsi ini di berbagai daerah.

Namun, Manik sendiri sadar jika saat aksi ini berlangsung media sosial seolah menjadi dua sisi mata uang. Jika sisi baiknya adalah menjadi alat penyebaran gerakan, maka sisi negatifnya adalah menjadi alat untuk melumpuhkan gerakan. Hal ini karena menurut Manik, peperangan narasi di media sosial saat aksi kemarin juga tak kalah ramai. Misalnya, narasi jika aksi ini ditunggangi oleh kepentingan sejumlah elit politik. Selain itu beredarnya *hoax* atau berita bohong juga menjadi tantangan sendiri

untuk dihadapi saat aksi kemarin. Dari narasi dan *hoax* yang tersebar itu bisa jadi muncul kesalahpahaman di tengah publik terhadap jalannya aksi ini.

Saat ditanya alasan memilih aksi turun ke jalan, Manik bercerita jika dia dan kawan-kawan yang lain sudah menempuh beberapa tahapan advokasi. Mulai dari membuat petisi di platform digital, audiensi, dan tahapan lainnya. Tapi setiap tahapan itu tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Akhirnya, kawan-kawan mahasiswa merasa jika perlu tahapan lain yang lebih memberikan tekanan kepada pemerintah dan DPR agar aspirasi mereka didengar. Kemudian dipilih tahapan selanjutnya yaitu aksi turun ke jalan yang lebih memobilisasi massa untuk meyakinkan jika memang ada yang bermasalah di negara ini.

Salah satu hal yang juga melekat di ingatan Manik saat ramai aksi kemarin yaitu jaringan internet sempat terputus. Padahal jaringan internet begitu penting untuk melakukan koordinasi dan komunikasi antara sesama peserta aksi baik di Jakarta maupun daerah lain. Tantangan lainnya adalah adanya penyadapan yang dilakukan kepada sejumlah peserta aksi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kemudian di Papua sendiri, Manik menceritakan jika akses komunikasi bahkan benar-benar dibatasi. Namun, tantangan ini berhasil dilewati dan aksi tetap berlangsung sampai akhir.

Selain Manik, ada juga obrolan dengan salah satu pegiat HAM yaitu Puri Kencana Putri. Menurutnya aksi turun ke jalan seperti Reformasi Dikorupsi kemarin jelas harus dilindungi karena merupakan salah satu hak sipil yang tercantum dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dulu, hak menyatakan pendapat diidentikan dengan aksi turun ke jalan. Di era digital saat ini, sudah ada beragam bentuk aksi misalnya ikut dalam petisi, survei, polling, jajak pendapat atau menyampaikan lewat produk digital dan disebar di media sosial.

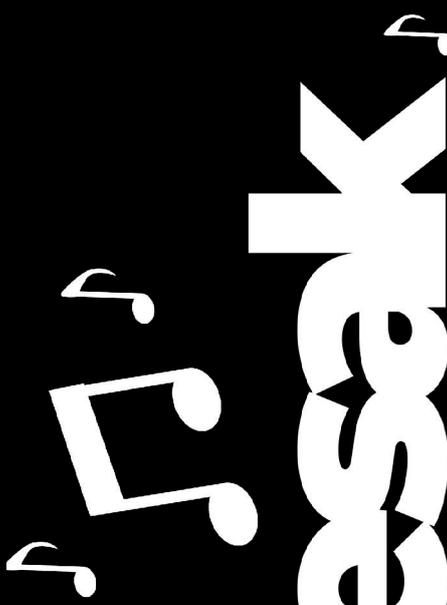
Pada aksi kemarin, kombinasi gerakan sosial masa lalu dan gerakan sosial era digital sebenarnya bisa saling memperkuat. Ide untuk menyampaikan pendapat secara damai tidak seharusnya menegasikan aksi protes di jalanan. Karena harus diakui, hingga saat ini aksi turun ke jalan jauh lebih baik, efektif, dan memiliki dampak jangka panjang bila melihat kondisi Indonesia saat ini. Jika aksi turun ke jalan ini bisa dilakukan dengan skala yang besar maka bisa dipastikan tekanan yang didapat oleh pemerintah dan lembaga terkait juga lebih besar.

Menurut Puri, aksi Reformasi Dikorupsi memiliki pendekatan tersendiri. Pendekatan kreatif digital seperti kemarin terbukti berhasil menggalang banyak dukungan dan aspirasi publik. Tapi, jangan lupa pula jika tak kalah penting untuk memperdalam dan memperluas pokok pendapat dan aspirasi publik tersebut. Lebih jauh, kini aktivisme sudah menjadi gaya hidup dan banyak orang mulai paham dengan ide aktivisme ini. Selain itu, saat ini banyak pula perubahan baik dan signifikan yang terjadi diawali dengan gerakan sosial.

Apresiasi lain juga disampaikan Puri soal anak muda saat ini. Menurutnya, partisipasi anak muda tidak boleh ditinggalkan. Karena kelompok muda bukan hanya penonton, konsumen produk dan bonus demografi saja. Sejak dulu anak muda selalu punya peranan, menjadi kelompok kritis, penekan dan akan selalu ada di setiap lintas zaman. Aksi kemarin menunjukkan jika kelompok muda nyatanya memiliki kepekaan sosial tinggi dan paham dengan situasi politik nasional. Karena anak muda selalu menjadi kunci perubahan setiap zaman.

Referensi:

- Abdulsalam, Husein. (2018). Tirto.id: Malari 1974: Protes Mahasiswa Yang Ditunggangi Para Jenderal. Diakses dari tautan: <https://tirto.id/malari-1974-protas-mahasiswa-yang-ditunggangi-para-jend-eral-cDe9>.
- Adam, Aulia. (2019). Tirto.id: Memahami Peran Gen Z dalam Aksi #ReformasiDikorupsi di DPR". Diakses dari tautanL <https://tirto.id/eiNt>.
- Amirullah. (2019). Tempo.co: Aliansi Mahasiswa Tuntut Penuntasan Agenda Reformasi. Diakses dari tautan: <https://nasional.tempo.co/read/1251273/aliansi-mahasiswa-tuntut-penuntasan-agenda-reformasi/full&view=ok>.
- Firdausi, Fadrik Aziz. (2019). Tirto.id: Sejarah Demonstrasi Mahasiswa yang Mengancam & Menumbangkan Rezim. Diakses dari tautan: <https://tirto.id/eiBo>.
- Galih, Bayu. (2018). Kompas.com: 21 Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi. Diakses dari tautan: <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/21/06480851/21-mei-1998-saat-soeharto-dijatuhkan-gerakan-reformasi>.
- Halloran, Richard. (1974). New York Times: Violent Crowds in Jakarta Protest The Visit by Tanaka. Diakses dari tautan: <https://www.nytimes.com/1974/01/16/archives/violent-crowds-in-jakarta-protest-the-visit-by-tanaka-thousands.html>.
- Tirto.id. (2017). Tirto.id: 1998: Tuntutan Reformasi, Perubahan Kekuasaan, Penembakan. Diakses dari tautan: <https://tirto.id/1998-tuntutan-reformasi-perubahan-kekuasaan-penembakan-cpeg>.
- Tempo. (2014). Tempo: Malari Power Play. Diakses dari tautan: <https://en.tempo.co/read/545002/malari-power-play#>.



Konser Santuy untuk
Isu Mendesak

Oleh: Ayunita Xiao Wei

Konser Mendesak tapi Santuy atau #MendesakTapiSantuy menjadi upaya untuk memfasilitasi muda mudi yang belum terlibat dalam aksi #ReformasiDikorupsi dan juga untuk memperbincangkan isu yang diangkat selama aksi. Upaya ini dibalut dengan seni musik dengan memanfaatkan platform digital, yang bisa juga disebut sebagai aktivisme digital. Berikut wawancara singkat Pamflet bersama Lini Zurlia, salah satu inisiator #MendesakTapiSantuy.

Bagaimana pendapatmu tentang aktivisme digital saat ini? Apakah dapat mendukung gerakan?

Ada positifnya. Kita bisa mengambil keuntungan dari arena digital untuk *pushing our issues*. Penting [untuk dibuat] menjadi strategi untuk gerakan sipil pro-demokrasi, isu perempuan dan feminisme karena media mainstream tidak pro dengan isu-isu kita. Aktivitas digital bisa menjadi salah satu alternatif. Selain itu, kita bisa mengajak orang sebanyak mungkin karena dunia digital memungkinkan orang untuk memiliki akun alter yang bisa menyembunyikan identitas aslinya namun di sisi lain bisa ikut terlibat di berbagai macam isu. Sisi negatifnya, karena digital, arena yang didukung oleh kecepatan internet membuat peluang untuk tersebarnya misinformasi lebih cepat, tidak fokus pada penyampaian informasi isu namun pada komentar-komentar yang bisa menimbulkan misinformasi.

Kenapa akhirnya aktivisme digital ini muncul?

Muncul karena dirasa penting. Saat ini kita seperti tidak memiliki batas antara online dan *on ground* arena. Jadi, sebisa mungkin memaksimalkan kedua ruang ini.

Bagaimana manfaat aktivisme digital untuk pergerakan itu sendiri?

Mampu menjadi sebuah platform untuk memobilisasi masa dan isu.

Bagaimana dengan keamanan aktivisme digital itu sendiri?

Hampir serupa dengan *offline*. Saat bertemu dengan orang baru, menjaga keamanan secara fisik yang tepat adalah dengan tidak memberikan informasi-informasi pribadi di platform tempat kita melakukan aktivisme digital. Perbedaannya antara *offline* dan *online*

adalah kalau ada yang yang tidak suka dengan gagasan kita, maka lebih mudah untuk menyerang kita dengan sangat kasar dan ada kemungkinan membahayakan di kehidupan sehari-hari kita.

Biasanya, orang yang menyerang kita secara *online* malah tidak berani untuk menyerang kita secara *offline* atau secara langsung bertemu dengan orangnya. Bagaimana menurutmu?

Memang seperti itu, karena di dalam dunia *online* tidak saling kenal maka lebih mudah untuk menyerang. Namun, itu juga bisa membawa dampak pada *individual activism* kalau tidak memiliki daya lenting yang tinggi, *coping mechanism*, seperti contohnya saya menggunakan platform Facebook dan Twitter. Maka, di sana saya tidak pernah menaruh informasi tentang teman atau pasangan, atau apapun karena sasaran mereka bukan hanya saya, tetapi juga orang-orang di sekeliling saya.

Apakah aktivisme digital hari ini sudah menyuarakan isu atau kebutuhan masyarakat saat ini?

Tergantung, karena banyak isu yang menggunakan *space digital*, menjadi tidak efektif karena hanya berhenti di *online activism*. Padahal, semua aktivitasnya harus sinkron antara *online* dan *offline*.

Sudah adakah dampak dari aktivisme digital itu sendiri?

Susah untuk mengukur dampak tapi setidaknya upaya yang kita lakukan adalah usaha untuk mensinkronisasi

online spaces dan *offline spaces* dan itu yang paling penting. Paling tidak, generasi kita sekarang mengetahui adanya *mass public protest* terhadap satu kondisi yang tidak adil.

Siapa sih sasaran aktivisme digital saat ini?

Kalau aktivisme digital pasti targetnya generasi milenial dan setelahnya. Sulit untuk direlasikan kepada boomers, karena teknologinya saja masih gagap, bagaimana dengan platformnya. Misinformasi pun lebih banyak terjadi di generasi boomers. Jadi, susah untuk generasi boomers itu sendiri, gap nya terlalu lebar.

Karena platform digital sangatlah luas, bagaimana dengan tindak lanjut aktivisme digital itu sendiri?

Memaksimalkan digital arena bukan hanya platform media sosial, tapi semua manfaat yang disuguhkan arena digital sebagai sarana untuk mengoptimalkan aktivisme kita. Misalnya, kita harus mengadakan rapat, maka tidak harus ketemu tapi bisa *video call* atau menggunakan platform lainnya.

Kenapa harus menyelenggarakan konser digital?

Mendesak tapi Santuy itu sudah diselenggarakan di beberapa titik dan setiap titiknya ada diskusi diselingi dengan musik. Diskusinya juga bukan topik yang santuy. Santuy-nya kan performer-nya. Setiap membuat acara ini banyak yang menanyakan kapan mau dibuat di kota-kota mereka,

karena banyaknya permintaan tersebut tapi adanya keterbatasan musisi sehingga kita hanya memiliki beberapa seniman dan kasihan untuk membawa mereka kemana-mana. Ide ini muncul dari Mas Iksan Skuter untuk membuat konser digital saja, memaksimalkan waktu seniman, memaksimalkan orang-orang yang ingin berdiskusi. Kenapa namanya Mendesak tapi Santuy karena kita mau isunya menggema walau mendesak tapi tetapi santuy. Jadi, kita berhenti sementara dari kekerasan yang ada tapi isunya tetap bergaung. Kalau dihitung penonton kita sampai 13.000 secara akumulatif dari enam belas seniman digital itu.

Kalau melihat dari potensi massa, apa konser digital lebih besar dibandingkan acara *offline*?

Keuntungan dari konser digital adalah ekonomis tanpa *budget* kecuali untuk kuota ya. Jangkauannya lumayan besar namun karena sifatnya digital maka hanya bisa meraup orang-orang di kota-kota besar (Jawa dan Bali yang kemarin) tetap harus ada sinkronisasi antara *offline* dan *online*-nya.

Bagaimana harapan tindak lanjut dan rencana kalian mengenai konser digital?

Perlu diadakan lagi, tapi nanti karena belum dibicarakan lagi, dan belum tahu digital lagi atau tidak.

Kenapa musik dipilih sebagai medium isu #ReformasiDikorupsi?

Karena kita menyadari saat ini musik folk, indie, sedang hype di kalangan milenial ke bawah dalam menyuarakan ide-ide keresahan. Kita hanya mengambil momentum itu saja.

Selain musik apa ada medium lain yang bisa digunakan?

Menurut saya *sih*, film atau apapun karya yang dibuat secara independen, karena orang-orang berbeda tipe. Ada yang mau melihat fisiknya, atau musiknya atau diskusinya atau keduanya, visual dan membaca juga wujudnya juga bisa.

Siapa Kami

Perkumpulan Pamflet Generasi (Pamflet) adalah organisasi anak muda yang didirikan untuk mendorong dan memperkuat anak muda untuk berpartisipasi dalam proses gerakan sosial, dengan memberikan informasi serta pengetahuan tentang aktivisme dan hak asasi manusia.

Pamflet didirikan dan juga dijalankan oleh anak muda yang berusia 16-30 tahun. Dengan tiga divisi utama: Youth Studies, Youth Movement, dan Youth Activism, kami bekerja untuk memperkuat akses anak mudaterhadap informasi, sumber daya, dan jaringan yang terkait dengan hak asasi manusia. Pamflet juga aktif mendorong inisiatif anak muda lokal (individu/kolektif) di berbagai wilayah di Indonesia melalui kegiatan seperti penelitian, pengembangan kapasitas, pelatihan, kampanye kreatif, dan publikasi.

Temukan Kami di:

Situs web : www.pamflet.or.id

Instagram : [@pamfletgenerasi](https://www.instagram.com/pamfletgenerasi)

Facebook : [facebook.com/pamfletgen](https://www.facebook.com/pamfletgen)

Twitter : [@_pamflet](https://twitter.com/_pamflet)

Youtube : [Pamflet Generasi](https://www.youtube.com/PamfletGenerasi)

Surel : halo@pamflet.or.id



PAMFLET